



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN *CUSTOMS ADVANCE
TRADE SYSTEM (CATS)* DAN IMPLEMENTASINYA
MELALUI SISTEM *INDONESIA NATIONAL SINGLE
WINDOW (INSW)* SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM
MENDUKUNG KELANCARAN ARUS BARANG DI KANTOR
PELAYANAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi

DANCE IDA

0905232576

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI FISKAL**

DEPOK

Januari 2012

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : DANCE IDA

NPM : 0905232576

Tanda Tangan : 

Tanggal : 17 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Dance Ida
NPM : 0905232576
Program Studi : Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Formulasi Kebijakan *Customs Advance Trade System* (CATS) dan Implementasinya melalui Sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang Di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si., (.....)

Sekretaris : Erwin H, MSak (.....)

Penguji Ahli : Drs. Iman Santoso, M.Si. (.....)

Pembimbing : Ali Purwito M, SH, MM. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Januari 2012

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

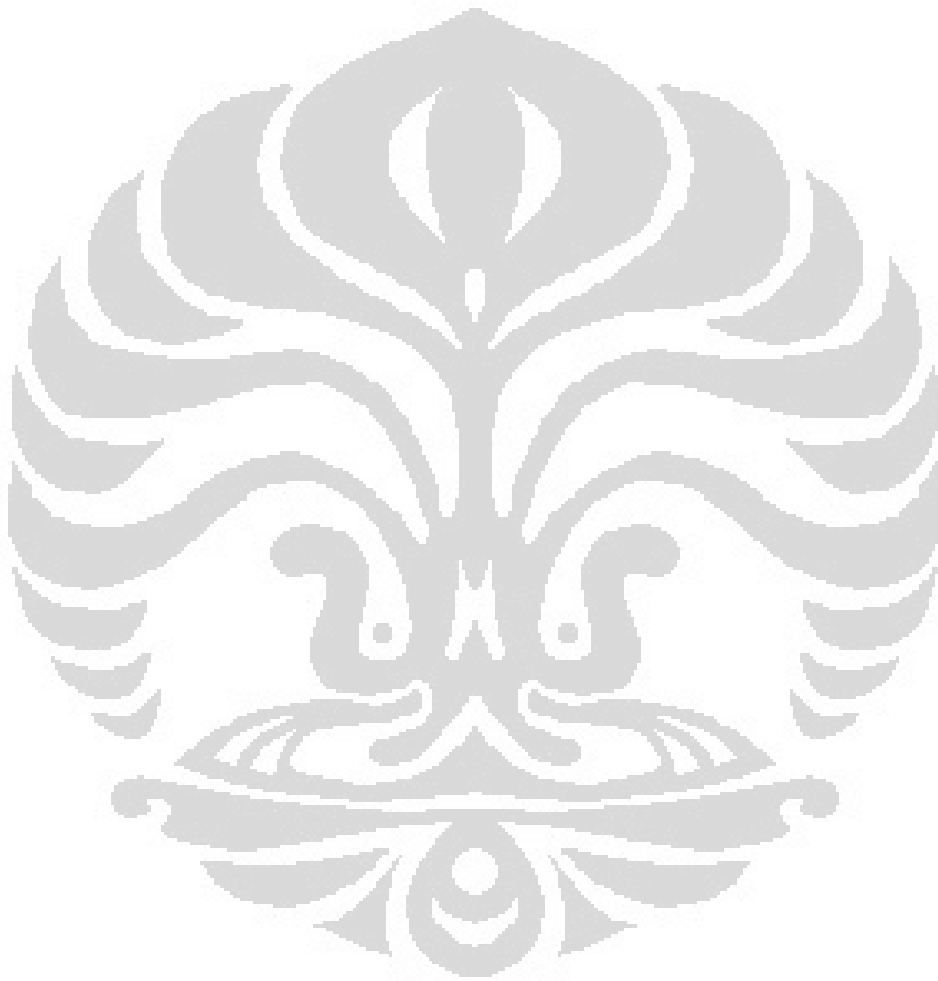
Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mamaku yang tercinta, serta adik tersayang Fanny dan Charlie dan seluruh keluarga tercinta yang telah menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksomono, M.Sc. selaku dekan FISIP UI.
3. Dr. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Program Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Dr. Ning Rahayu, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Sarjana Ekstensi FISIP UI.
5. Bapak Ali Purwito, SH, MM., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu yang panjang dan perhatiannya untuk memberikan petunjuk, dukungan, kemudahan dalam berpikir dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Adang Karyana Syahbana B.Sc. S.S.T., selaku informan dari Widyaiswara Madya Kapusdiklat Bea dan Cukai untuk Pengajuan Kabid Pendidikan.
7. Bapak Drs. Axis Pranoto, selaku informan dari Praktisi Kepabeanaan dan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak.
8. Prof. Dr. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D, selaku informan, Ahli Hukum Administrasi Negara sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
9. Teman-teman seangkatan yang senasib, seperjuangan, dan se penderitaan.
10. Google.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Januari 2012

Dance Ida



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dance Ida
NPM : 0905232576
Program Studi : Ekstensi
Departemen : Ilmu Administrasi Fiskal
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN CUSTOMS ADVANCE TRADE SYSTEM (CATS) DAN IMPLEMENTASINYA MELALUI INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM Mendukung Kelancaran Arus Barang di KPU TANJUNG PRIOK

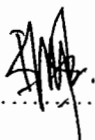
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 17 Januari 2012

Yang menyatakan

()

ABSTRAK

Nama : Dance Ida
Program studi : Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN *CUSTOMS ADVANCE TRADE SYSTEM (CATS)* DAN IMPLEMENTASINYA MELALUI SISTEM *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)* SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM Mendukung KELANCARAN ARUS BARANG DI KPU TANJUNG PRIOK

Skripsi ini membahas kebijakan *Customs Advance Trade System (CATS)* dan implementasinya melalui system *Indonesia National Single Window (INSW)* sebagai salah satu upaya dalam mendukung kelancaran arus barang di KPU Tanjung Priok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyarankan merumuskan kebijakan publik turut memperhatikan ketepatan dalam identifikasi masalah yang akan dipecahkan. Pencarian dan pengembangan ide kreatif guna mengurangi permasalahan khususnya dalam kelancaran arus barang. Serta menyarankan keterlibatan pihak yang terkait dalam bidang ekspor-impor dari segi IT.

Kata kunci:

Customs Advance Trade System (CATS), Indonesia National Single Window (INSW), IT

ABSTRACT

Name : Dance Ida
Study Program : Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : FORMULATION ANALYSIS OF CUSTOMS ADVANCE TRADE SYSTEM (CATS) POLICY AND THE IMPLEMENTATION THROUGH *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW* (INSW) SYTEM AS ONE OF EFFORT IN SUPPORTING OF GOODS SUPPLY CHAIN AT THE KPU TANJUNG PRIOK

The focus of this study is the policy of the Advance Customs Trade System (CATS) dan the implementation of *Indonesia National Single Window* (INSW) as an effort to support supply chain of goods at KPU Tanjung Priok. This study is a descriptive qualitative research approach. The results also suggest formulating public policy attention to accuracy in identifying the problem to be solved. Search and development of creative ideas to reduce the problem, especially in goods supply chain. And suggesting the involvement of stakeholders in the field of export-import in terms of IT.

Key words:

Customs Advance Trade System (CATS), *Indonesia National Single Window* (INSW), IT

DAFTAR ISI

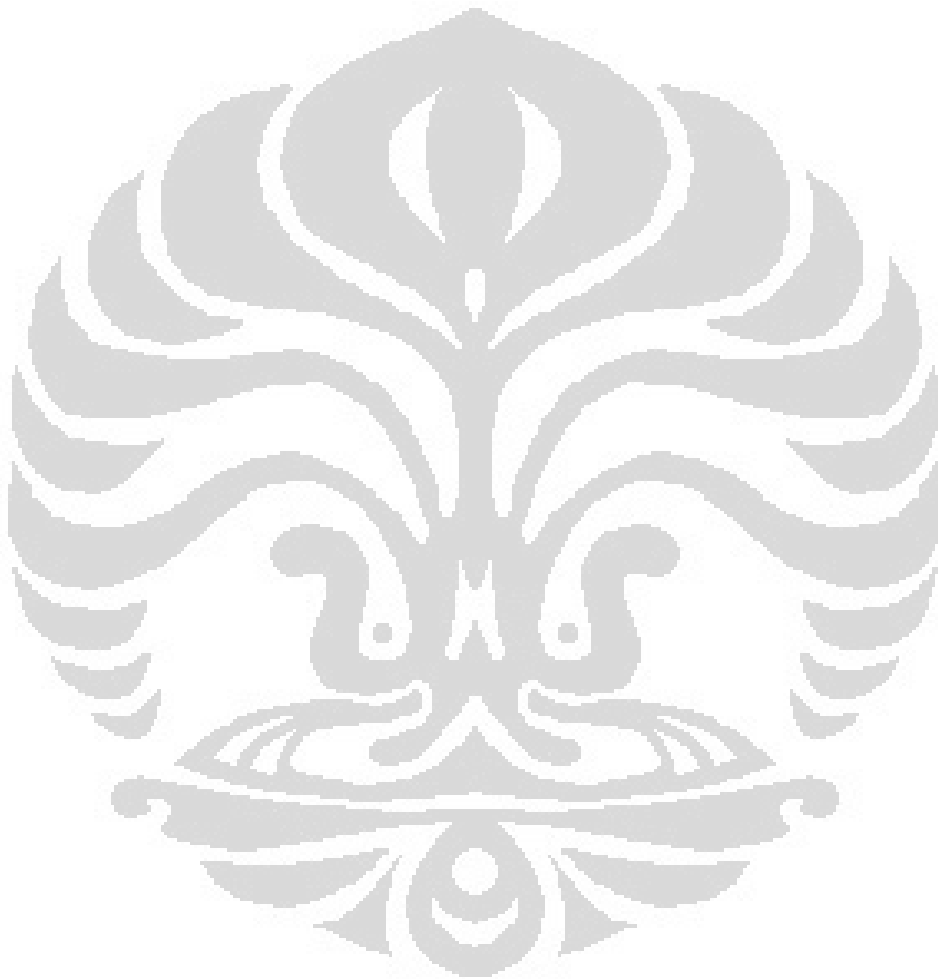
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Signifikansi Penelitian	8
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORI	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.2 Teori	16
2.2.1 Kebijakan Publik	16
2.2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	16
2.2.1.2 Proses Kebijakan	18
2.2.1.3 Perumusan / Formulasi Kebijakan Publik	20
2.2.2 Administrasi	28
2.2.3 Pajak atas Lalu Lintas Barang	29

		10
	2.2.3.1 Impor dan Ekspor	29
	2.2.3.2 Penimbunan	30
	2.2.3.3 Transportasi	31
	2.2.4 Teori Manajemen Arus Barang	35
	2.2.5 Teori Organisasi	37
	2.2.6 Teori Sistem Informasi Manajemen	36
2.3	Kerangka Pemikiran	38
BAB III	METODE PENELITIAN	41
3.1	Metode Penelitian	41
3.2	Pendekatan Penelitian	41
3.3	Jenis Penelitian	42
3.4	Proses Penelitian	45
3.5	Penentuan Site Penelitian	46
3.6	Batasan Penelitian	46
BAB IV	GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN UTAMA TANJUNG PRIOK DAN CUSTOMS ADVANCE TRADE SYSTEM (CATS)	48
1.1	Kantor Pelayanan Umum Tanjung Priok	48
1.2	Customs Advance Trade System (CATS)	52
BAB V	ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN <i>CUSTOMS ADVANCE TRADE SYSTEM (CATS)</i> DAN IMPLEMENTASINYA MELALUI SISTEM <i>INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)</i> SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM Mendukung Kelancaran ARUS BARANG DI KPU TANJUNG PRIOK	54
5.1	Formulasi Kebijakan Customs Advance Trade System (CATS)	54
5.1.1	Proses Formulasi Kebijakan Customs Advance Trade System (CATS)	55

5.1.2	Tipe Formulasi Kebijakan Customs Advance Trade System (CATS)	57
5.1.3	Model Formulasi Kebijakan Customs Advance Trade System (CATS)	57
5.2	Customs Advance Trade System (CATS) Sebagai Salah Satu Upaya Mendukung Kelancaran Arus Barang di KPU Tanjung Priok	58
5.3	Proses implementasi system CATS melalui system INSW	70
5.4	Perkembangan Penerapan Sistem INSW	73
5.5	Perubahan yang terjadi setelah penerapan Sistem Informasi Manajemen melalui sstem INSW	73
BAB VI	PENUTUP	76
6.1	Simpulan	76
6.2	Saran	76

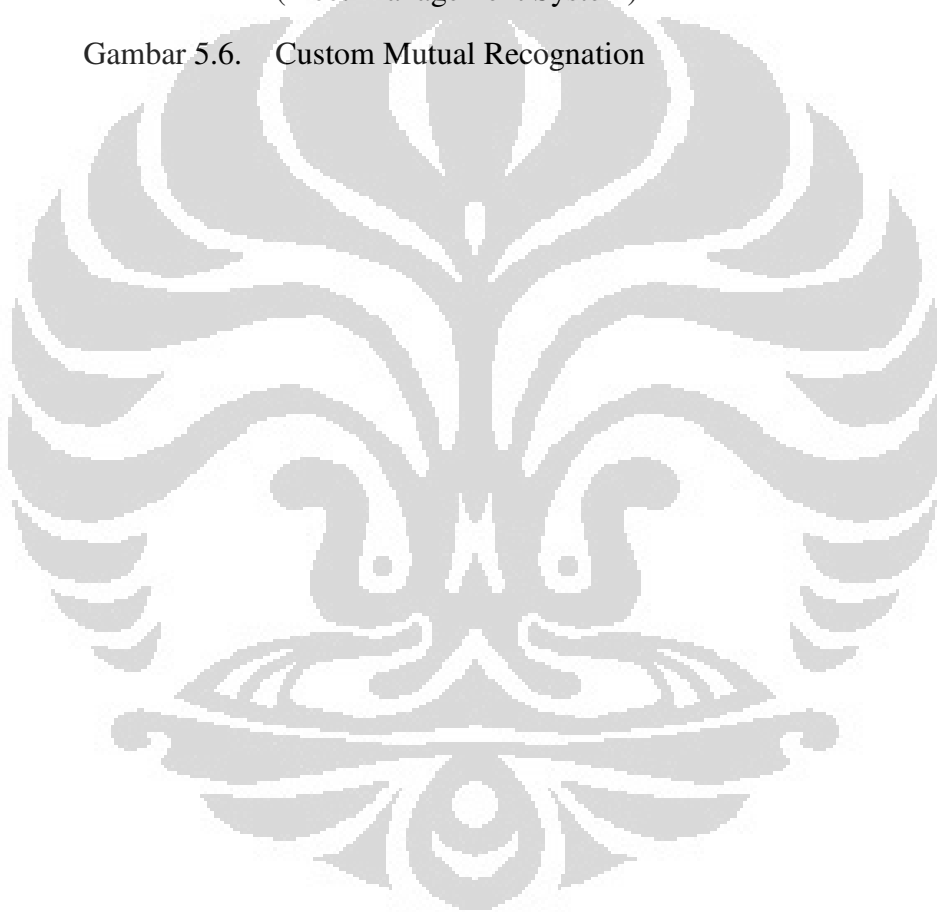
DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Yard Occupancy Ratio (YOR)
- Tabel 2.1. Matriks Tinjauan Pustaka
- Tabel 2.2. Kerangka Pemikiran
- Tabel 4.1. Struktur Organisasi
- Tabel 5.1. Jumlah ekspor Impor tahun 2007-2011



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 5.1. Rantai Distribusi
- Gambar 5.2. Proses Clearance
- Gambar 5.3. Proses Clearance menurut CATS
- Gambar 5.4. Hub-Spoke System
- Gambar 5.5. Security & Trackability on movement of goods
- Gambar 5.6. Teknologi GPS menggunakan Platform GSM/GPRS pada (Fleet Management System)
- Gambar 5.6. Custom Mutual Recognition



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi ekonomi yang menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang finansial, produksi dan perdagangan telah membawa dampak pengelolaan ekonomi Indonesia. Kondisi ini semakin nyata setelah arus globalisasi ekonomi semakin berkembang seiring dengan prinsip liberalisasi perdagangan dunia (*trade liberalization*) yang telah diupayakan bersama sama oleh negara-negara lain dalam bentuk kerjasama ekonomi regional salah satu contohnya adalah *Asean Free Trade Agreement* (AFTA). Dalam bidang perkonomian dan perdagangan internasional Indonesia harus dapat menyesuaikan perkembangannya dengan tatanan ekonomi dunia dan kemandirian sistem perdagangan internasional yang semakin berkembang.

Melalui <http://www.bps.go.id/> upaya pemerintah dalam meningkatkan tatanan ekonomi serta kemandirian sistem perdagangan dapat dilihat melalui komitmen pemerintah RI dalam beberapa kesepakatan di tingkat regional ASEAN.

1. Kesepakatan Pemimpin Negara Anggota ASEAN dalam *The Declaration of Asean Concord II* (Bali Concord II), 7 Oktober 2003
2. Kesepakatan Menteri Ekonomi ASEAN dalam *Asean Agreement to Establish & Implement The Asean Single Window*, 9 Desember 2005
3. Kesepakatan Menteri Keuangan ASEAN dalam *Asean Protocol to Establish and Implement The Asean Single Window*, April 2006
4. Kesepakatan Pemimpin Negara Anggota ASEAN dalam *Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint*, 20 Nopember 2007

Komitmen pemerintah dalam kesepakatan tingkat regional mendorong program kelancaran arus barang ekspor-impor dan daya saing nasional. Program tersebut membutuhkan kerjasama yang baik secara institusional, peraturan sistem

maupun infrastruktur yang terkait. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor, sangat dibutuhkan adanya integrasi sistem antar instansi pemerintah (*Government Agencies*) yang mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor. Dalam mewujudkan *Good Governance*, tahun 2010 pemerintah Indonesia berkonsentrasi untuk mengurangi berbagai hambatan (*bottlenecking*) yang selama ini menghalangi, baik pertumbuhan investasi maupun ekonomi seperti berbagai regulasi dan masalah pertanahan serat benturan tata ruang dan tumpang tindih perizinan (Warta Bea Cukai no 422, Januari 2010).

Demi meningkatkan daya saing perekonomian nasional pemerintah meningkatkan kinerja sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good-governance* melalui pembangunan otomasi system pelayanan yang terintegrasi. Dengan menerapkan prinsip "*Good Governance*" diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, efisien, responsif dan transparan. Seiring dengan tuntutan perekonomian, pada tahun 2010 pemerintah menetapkan target penerimaan bea keluar sebesar Rp. 7,63 triliun. Total target penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya akan disebut dengan DJBC, berdasarkan APBN di 2010 sebesar Rp. 84,49 triliun (Warta Bea Cukai, 2010, p. 10). Untuk mencapai target tersebut, akan ditempuh DJBC melalui beberapa strategi, seperti:

1. Membentuk organisasi DJBC yang modern
2. Membentuk *Authorized Economic Operator* (AEO)
3. Mewujudkan sistem pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif
4. Mewujudkan sistem pembinaan dan latihan SDM yang didasarkan pada kompetensi
5. Mengimplementasikan *National Single Window* (NSW) secara bertahap
6. Membentuk mekanisme harmonisasi kebijakan perdagangan, kepabeanan dan cukai
7. Membentuk sistem teknologi informasi kepabeanan dan cukai yang terintegrasi
8. Membentuk manajemen pengadaan, operasi dan perawatan sarana dan prasarana yang optimal.

Sebagai fasilitator perdagangan, DJBC perlu memberikan pelayanan yang efisien dan melakukan pengawasan yang efektif yang dilaksanakan sejalan dengan sistem kepabeanan internasional. Untuk itu DJBC telah menggunakan teknologi informasi yang mutakhir guna mendukung penerapan *National Single Window* (NSW). Dalam menunjang fasilitas perdagangan diciptakan *integrated logistics system*. Sistem tersebut merupakan suatu rekayasa atas bisnis proses yang telah ada dan melibatkan kerjasama dan sinergi semua pihak baik yang bersifat B2B (*business to business*), B2G (*business to government*), dan G2G (*government to government*). Model logistik tersebut dinamakan *Customs Advance Trade System* (CATS).

Seperti yang dikutip dari (Warta Bea Cukai Edisi 422, h.10) Kasubdit KITE dan TPB Dit. Fasilitas Kepabeanan, Robert Leonard Marbun selaku anggota Tim Kerja Implementasi CATS menjelaskan, CATS melakukan perubahan atas sistem pelayanan dan pengawasan yang telah ada dengan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur teknologi informasi dalam rekayasa proses bisnis yang ada. Ini artinya sistem pelayanan maupun pengawasan sekarang yang menitikberatkan pada proses manual seperti pemeriksaan fisik atas dokumen dan barang akan semakin berkurang dengan digunakannya piranti dan infrastruktur IT". Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan yang dilakukan akan menggantikan proses manual dengan proses elektronik, yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan melalui fasilitas administrasi dan prosedur yang sederhana, efisien dan dapat diprediksi.

Sistem pengawasan yang saat ini dilakukan menggunakan segel kertas yang mudah untuk rusak dan tidak adanya penetapan rute khusus dari Pelabuhan (kawasan pabean) ke kawasan industri (kawasan berikat, TPB). Hal ini menimbulkan sistem keamanan yang rentan penyimpangan dan sulit untuk diawasi. Perbaikan sistem pengawasan yang terintegrasi akan memudahkan proses pengawasan. Pengawasan yang dilakukan akan meliputi penetapan rute yang harus dilalui oleh kontainer dan peningkatan kualitas segel.

Dalam menjalankan wewenangnya sebagai pengawas dan fasilitator kegiatan kepabeanan, DJBC tidak dapat lepas dari tugasnya untuk mengawasi banyaknya timbunan barang di tempat penimbunan barang. Terhadap barang

ekspor-impor yang belum memenuhi kewajiban kepabeanan, dapat dilakukan penimbunan barang yang berada dibawah pengawasan pabean. Tempat penimbunan barang dibawah pengawasan pabean tersebut di lokasi pengusaha dan ruangan tertutup atau terbuka yang disetujui oleh pabean sambil menunggu pengajuan Pemberitahuan Barang.

Secara prinsip pabean, tempat penimbunan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, dan Tempat Penimbunan Pabean. Barang-barang impor-ekspor tersebut dapat ditimbun dalam tempat tersebut sesuai dengan kualifikasi barang tersebut.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa barang ekspor-impor dapat ditimbun selama dilakukannya pemenuhan kewajiban kepabeanan. Hal ini pada kenyataannya menyebabkan tumpukan timbunan barang di lokasi Penimbunan Barang. Penumpukan barang dapat ditentukan dengan :

1. *Yard Occupancy Ratio* (YOR) atau tingkat penggunaan lapangan penumpukan adalah perbandingan antara penggunaan lapangan pemukan dengan lapangan penumpukan yang tersedia (siap operasi) yang dihitung dalam satuan ton/hari atau m³/hari.
2. *Shed Occupancy Ratio* (SOR) atau tingkat penggunaan gudang adalah perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penumpukan dengan ruang penumpukan yang tersedia yang dihitung dalam satuan ton / hari atau m³ / hari.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-26/BC/2007 tentang Tatalaksana Pindah Lokasi Penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari satu tempat penimbunan sementara ke tempat penimbunan semenatra lainnya, Pasal 3 ayat 1 "*Izin PLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam hal: a. YOR atau SOR TPS bersangkutan telah melampaui batas 85% dan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean dapat terjadi stagnansi;*". Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat penumpukan penimbunan barang yang telah mencapai 85% dapat menyebabkan stagnansi atau ketidاكلancaran arus barang yang ditimbun didalam lokasi penimbunan.

Tabel 1.1 Yard Occoupancy Ratio (YOR)
pada tempat Penimbunan Sementara di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok

No	Tempat Penimbunan	Tanggal 29 Mei 2008	Tanggal 19 Juni 2009
1	TPS JICT I	78 %	77 %
2	TPS MAL	107,39 %	83,12 %
3	TPS Koja	101,46 %	79,62 %
4	TPS Dwipa	62,69 %	44,83 %
5	TPS Reefer	52,43 %	46,90 %
6	TPS Graha	88,48 %	111,31 %

Sumber: Warta Bea Cukai, edisi 404, Juli 2008

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2008, 3 dari antara 6 TPS memiliki rasio diatas 85%, yang menunjukkan terjadinya ketidak-lancaran arus barang disejumlah TPS. Pada tahun 2009, seiring dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, hanya 1 dari 6 TPS yang memiliki rasio diatas 85%. Namun 3 TPS lainnya beresiko mengalami ketidاكلancaran arus barang karena berada diatas rasio 75%.

Kesulitan yang dialami eksportir maupun importir dalam melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan seringkali disebabkan oleh proses dan prosedur yang berlaku yang kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, DJBC sebagai fasilitator kegiatan ekspor-impor perlu meningkatkan kualitas pelayanannya guna mendukung efektifitas dan efisiensi biaya. Untuk itu pemerintah melalui DJBC mengembangkan suatu sistem untuk mengembangkan system logistic terkait implementasi *Customs Advance Trade System*.

CATS dalam pelaksanaannya menerapkan *Customs & Port Clearance System (Hub-Spoke/Inland Port System)* dengan menggunakan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT), Transportation System dengan menerapkan *fleet management* dalam pengangkutan barang, *Security System (security & traking* atas barang impor & ekspor), *Information System* (peningkatan kualitas

pelayanan dan pengawasan kepabeanan dengan IT system). Warta Bea Cukai Edisi 422, Januari 2010, h.11

KPPT yang merupakan salah satu pilar dari CATS adalah kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang secara terpadu didalamnya terdapat tempat penimbunan sementara (TPS), tempat konsolidasi barang ekspor (CFS), tempat penimbunan berikat (TPB), dan atau tempat usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan kepabeanan dan cukai.

Kewajiban KPPT sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu, adalah:

1. memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai KPPT pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
2. menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
3. mengajukan permohonan perubahan keputusan izin KPPT kepada Direktur Jenderal apabila terdapat perubahan nama, alamat, NPWP, luas, dan/atau penanggung jawab perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan;
4. memenuhi semua kewajiban sebagai pengusaha TPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas TPS yang dikelolanya;
5. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai terkait teknologi informasi dan media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai dan terpercaya terkait sistem transportasi dan pengangkutan barang ke dan dari KPPT;
7. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai terkait penggunaan segel elektronik; dan

8. menyediakan sistem otomasi pada gate masuk dan gate keluar TPS di KPPT yang terhubung dengan sistem aplikasi TPS online di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar.

Dari serangkaian kewajiban diatas dapat dilihat bahwa KPPT harus memiliki sistem informasi yang terpadu dan terhubung dengan sistem komputer yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain berfungsi sebagai penyelenggara tempat penimbunan sementara, KPPT juga berfungsi sebagai penyedia fasilitas transportasi ke dan dari KPPT. Hal ini menimbulkan banyaknya konsolidasi dari pihak-pihak yang terkait dalam proses penanganan barang yang akan diekspor maupun yang akan diimpor. Pihak-pihak tersebut mencakup bidang transportasi, perbankan, logistik, dinas kesehatan, dan lainnya.

1.2. Pokok Permasalahan

Kinerja instalasi publik, termasuk kinerja instansi pabean dan cukai yang telah dicapai dengan baik dapat menciptakan pembangunan administrasi yang kokoh yang kesemuanya mengarah dan bermuara pada tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, komponen kultur yang hendak dibangun pada sistem hukum pabean disamping dapat menciptakan *good governance*, sekaligus dengan tindakan yang sama, dapat mendukung dan mengarahkan pada kemampuan untuk membangun mitra atau pelanggan pabean untuk melaksanakan tata kelola usaha yang baik atau *good corporate governance*.

Perbaikan sistem yang sedang dikembangkan pemerintah melalui DJBC dalam hal ini CATS sepatutnya didukung pihak-pihak terkait. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dibidang perpajakan khususnya mengenai formulasi kebijakan *Customs Advance Trade System* (CATS) sebagai salah salah satu upaya dalam mendukung kelancaran arus barang. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana formulasi kebijakan *Customs Advance Trade System* (CATS) sebagai salah salah satu upaya dalam mendukung kelancaran arus barang di KPU Tanjung Priok?
2. Bagaimana implementasi CATS melalui system INSW?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas dan menganalisis mengenai formulasi kebijakan CATS dan implementasinya melalui *Indonesia National Single Window* (INSW) dalam mewujudkan kelancaran arus barang pada KPU Tanjung Priok.

1.4. Signifikansi Penelitian

Ada beberapa signifikansi penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini baik bagi akademisi, praktisi maupun sosial. Signifikansi tersebut adalah :

1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi yaitu agar dapat menambah pengetahuan teoritis, praktis dan wawasan perpajakan mengenai formulasi kebijakan CATS dan implementasinya melalui *Indonesia National Single Window* (INSW) dalam mendukung kelancaran arus barang di Indonesia, khususnya di KPU Tanjung Priok. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kegiatan penelitian yang serupa dalam lingkup yang lebih luas dimasa yang akan datang.

Sebagai literatur ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa ingin mendalami sistem kepabeanan di Indonesia khususnya CATS dan implementasinya melalui *Indonesia National Single Window* (INSW).

2. Bagi Praktisi

Bagi praktisi yaitu untuk memperluas pengetahuan tentang formulasi kebijakan CATS dan implementasinya melalui *Indonesia National Single Window* (INSW) dalam mendukung kelancaran arus barang dan efisiensi dalam usaha yang berkaitan dengan kepabeanan. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada KPU Tanjung Priok dalam memaksimalkan pelayanan dan pengawasan dibidang kepabeanan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Masalah Penelitian yaitu merupakan alasan peneliti melakukan penelitian ini dan memilih judul penelitian. Pokok Permasalahan Penelitian yaitu alasan mengapa peneliti melakukan penelitian ini. Tujuan Penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu sesuai dengan pokok permasalahan. Dalam bab ini juga membahas signifikansi Penelitian, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat terhadap dunia akademisi dan dunia praktisi, kemudian yang terakhir dalam penulisan ini adalah Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini, peneliti menggambarkan tinjauan pustaka, kerangka teori dan kerangka pemikiran yang menguraikan berbagai landasan teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis penelitian ini, yang antara lain mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini membahas mengenai pendekatan penelitian, tipe penelitian, metode pengumpulan data, hipotesis kerja, narasumber/informan, proses penelitian, site penelitian dan pembatasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN UMUM FORMULASI KEBIJAKAN *CUSTOMS ADVANCE TRADE SYSTEM (CATS)* DAN KANTOR PELAYANAN UTAMA TANJUNG PRIOK

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum mengenai formulasi kebijakan *Customs Advance Trade System (CATS)* dan gambaran umum Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok.

BAB V ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN *CUSTOMS ADVANCE TRADE SYSTEM (CATS)* DAN IMPLEMENTASINYA MELALUI SISTEM *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)* SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM Mendukung Kelancaran ARUS BARANG DI KPU TANJUNG PRIOK

Didalam Bab V ini akan dibahas seluruh penjelasan mengenai informasi dan data yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara maupun penelitian melalui kajian pustaka untuk menganalisis formulasi kebijakan *CATS* sebagai salah satu upaya dalam mendukung kelancaran arus barang di KPU Tanjung Priok. Wawancara juga dilaksanakan untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu oleh pejabat DJBC melalui wawancara mendalam.

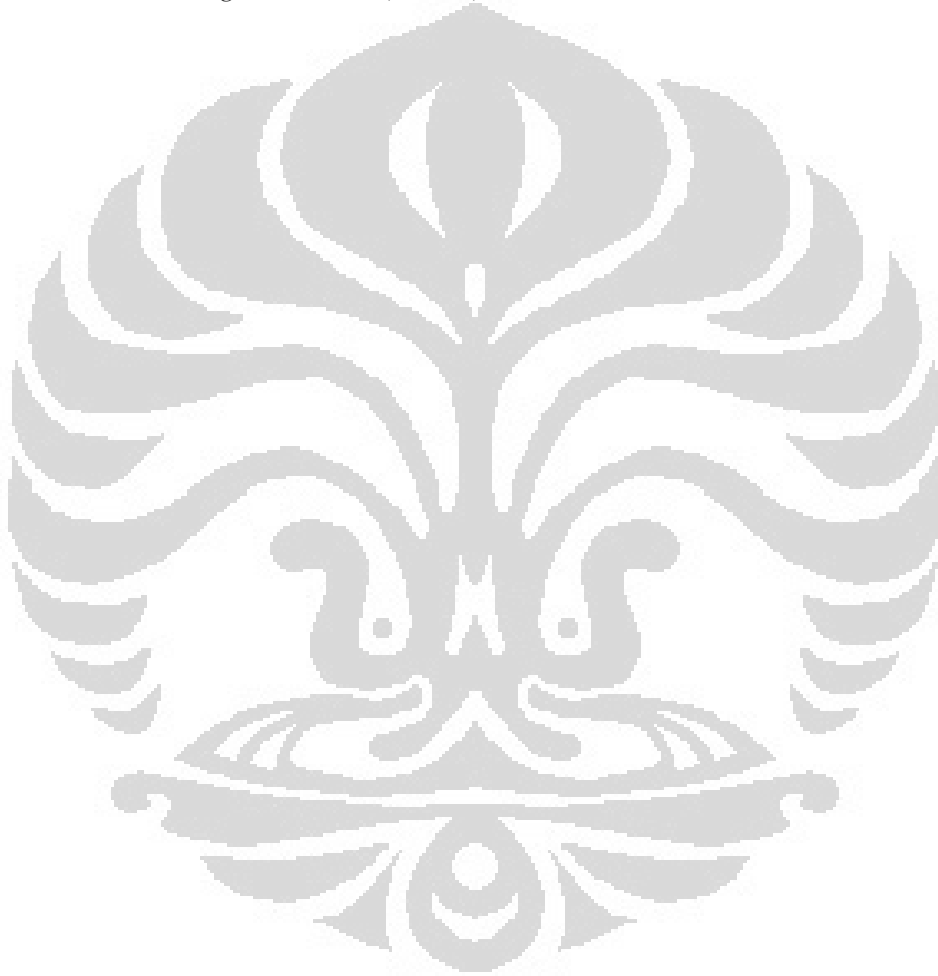
Bab ini akan membahas permasalahan yang terdapt dalam bab 1, dengan memberikan data yang didapat dari wawancara yang telah dibentuk rumusan pertanyaan dan akan diberikan penjelasan kuantitatif dengan analisa data tanpa rumus statistik tentang data yang terkait. Analisis digunakan akan berpedoman pada dasar teori yang diadopsi dalam bab2.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab V ini Penulis membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan mencakup formulasi kebijakan *Customs Advance Trade System (CATS)* dan implementasinya melalui *Indonesia National Single Window (INSW)* beserta kendala yang ditemui. Pada bab ini penulis juga akan juga memberikan saran

sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dan perusahaan yang melakukan aktivitas ekspor-impor.

Dalam bab ini dikemukakan simpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Peneliti memberikan rekomendasi sehubungan dengan permasalahan pokok yang ada, khususnya formulasi kebijakan *Customs Advance Trade System (CATS)* dan implementasinya melalui *Indonesia National Single Window (INSW)* .



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Analisis formulasi kebijakan *Customs Advance Trade System (CATS)* sebagai salah satu upaya dalam mendukung kelancaran arus barang di KPU Tanjung Priok belum pernah dilakukan, namun peneliti menemukan penelitian yang hampir serupa yaitu sebuah skripsi yang dibuat oleh Nov E, mahasiswa S-1 UI Ekstensi jurusan Administrasi Fiskal dengan judul “Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas bea masuk early harvest program (EHP) atas subsektor hortikultura dalam rangka perdagangan bebas asean-china periode 2004-2009” (Erika Novita, 2010). Pada penelitian ini dibahas bagaimana pelaksanaan kebijakan fasilitas bea masuk ehp dalam periode 2004-2009 di Indonesia.

Penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas bea masuk early harvest program (EHP) atas subsektor hortikultura dalam rangka perdagangan bebas asean-china periode 2004-2009, dengan teknik pengumpulan data memakai teknik Studi kepustakaan dan Studi lapangan serta melakukan wawancara mendalam dan studi literatur.

Hasil dari penelitian ini adalah tarif preferensi meningkatkan perdagangan indonesia-china, kondisi surplus pada tahap early harvest program (ehp) bilateral indonesia-china mendatangkan peluang yang lebih besar bagi produk domestik yang bersaing dengan pengeksport produk yang sama di pasaran cina. Namun, dari perdagangan sektor hortikultura mengalami defisit. Kebijakan ini masih belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik.

Kemudian penerimaan bea masuk menggeser fungsi kepabeanan yang semula sebagai pendapatan negara menjadi instrumen pengaman dan perlindungan hak-hak negara. Namun, penerimaan negara dari pajak impor meningkat sebanding dengan nilai impor yang datang. Sejauh ini pemerintah sedang memaksimalkan potensi alam, infrastruktur dan teknologi. Upaya pemerintah dari sisi teknologi belum semaksimal dengan potensi alam yang tersedia. Selain itu kualitas sumber daya manusia (sdm) pertanian belum ada peningkatan. Meski demikian, pemerintah sedang mengupayakan peningkatan

kualitas sumber daya manusia agar produk pertanian lebih berkualitas baik dari segi rasa, harga dan standar internasional.

Tinjauan pustaka juga dilakukan pada sebuah tesis yang berjudul “Kepemimpinan kepala daerah Kota Kendari dalam formulasi kebijakan Program Persaudaraan Madani”, yang dibuat oleh Nuurul A’yuni pada tahun 2009 sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia. Penelitian ini membahas tentang analisis kebijakan Program Persaudaraan Madani diformulasikan dan analisis kepemimpinan kepala daerah Kota Kendari dalam formulasi kebijakan Program Persaudaraan Madani.

Dalam penelitiannya, Nu’urul menggunakan konsep dan teori tentang kebijakan publik, analisa kebijakan, perumusan/formulasi kebijakan public, teori kepemimpinan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah teknik yang cocok untuk mengamati fenomena sosial. Metode pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam untuk memperoleh informasi mendalam tentang kepemimpinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui proses formulasi kebijakan Program Permadani dirumuskan berdasarkan tingginya angka kemiskinan di kota Kendari, dengan tahapan ide kepala daerah dibahas ditingkat eksekutif kemudian diimplementasikan di masyarakat dengan landasan operasional Peraturan Walikota No.1 tahun 76 tentang Persaudaraan Madani. Kepemimpinan Kepala Daerah Kota Kendari dalam formulasi kebijakan Program Permadani sudah sesuai dengan peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dalam konteks kebijakan publik.

Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kali ini berbeda dengan peneliti sebelumnya, yaitu akan membahas tentang kebijakan *Customs Advance Trade System (CATS)* sebagai salah satu upaya dalam mendukung kelancaran arus barang di KPU Tanjung Priok. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara mendalam, dengan pendekatan penelitian kualitatif.

Tabel 2.1 Matriks Tinjauan Pustaka

Nama Penulis	Nuurul A'yuni	Erika Novita	Dance Ida
Judul, Tahun Penelitian	Kepemimpinan kepala daerah Kota Kendari dalam formulasi kebijakan Program Persaudaraan Madani, 2009	Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas bea masuk early harvest program (EHP) atas subsektor hortikultura dalam rangka perdagangan bebas asean-china periode 2004-2009, 2010	Analisis Formulasi kebijakan <i>Customs Advance Trade System (CATS)</i> dan implementasinya melalui <i>Indonesia National Single Window (INSW)</i> sebagai salah satu upaya dalam mendukung kelancaran arus barang di KPU Tanjung Priok, 2012
Tujuan Penelitian	<p>1. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan Program Persaudaraan Madani diformulasikan.</p> <p>2. Untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan kepala daerah Kota Kendari dalam formulasi kebijakan Program</p>	Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan fasilitas bea masuk ehp dalam periode 2004-2009 di indonesia?	Bagaimana Formulasi kebijakan CATS dan implementasinya melalui <i>Indonesia National Single Window (INSW)</i> di KPU Tanjung Priok dapat mewujudkan kelancaran arus barang pada KPU Tanjung Priok?

	Persaudaraan Madani.		
Jenis, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data	Deskriptif analitis, Kualitatif, Teknik Pengumpulan data: Studi kepustakaan dan Studi lapangan	Deskriptif analitis, Kualitatif, Teknik Pengumpulan data: Studi kepustakaan dan Studi lapangan	Deskriptif analitis, Kualitatif, Teknik Pengumpulan data: Studi kepustakaan dan Studi lapangan
Hasil Penelitian	<p>1. Proses formulasi kebijakan Program Permadani dirumuskan berdasarkan tingginya angka kemiskinan di kota Kendari, dengan tahapan ide kepala daerah dibahas ditingkat eksekutif.</p> <p>2. Kepemimpinan Kepala Daerah Kota Kendari dalam formulasi kebijakan Program Permadani sudah sesuai dengan peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dalam konteks kebijakan</p>	<p>1. Tarif preferensi meningkatkan perdagangan indonesia-china, kondisi surplus pada tahap early harvest program (ehp) bilateral indonesia-china mendatangkan peluang yang lebih besar bagi produk domestik yang bersaing dengan pengekspor produk yang sama di pasaran cina. Namun, dari perdagangan sektor hortikultura mengalami defisit. Kebijakan ini masih</p>	<p>1. <i>Customs Advance Trade System (CATS)</i> merupakan pemikiran awal dari pada adanya penyelenggaraan dan penyelesaian pemberitahuan kepabeanan melalui 1 (satu) atap. <i>Customs Advance Trade System (CATS)</i> salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh DJBC dalam rangka mempercepat arus barang di KPU Tanjung Priok.</p> <p>2. <i>Customs Advance Trade</i></p>

	publik.	<p>belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik.</p> <p>2. Penerimaan bea masuk menggeser fungsi kepabeanan yang semula sebagai pendapatan negara menjadi instrumen pengaman dan perlindungan hak-hak negara. Namun, penerimaan negara dari pajak impor meningkat sebanding dengan nilai impor yang datang.</p>	<p><i>System (CATS)</i> diimplementasikan melalui peleburan dengan system yang sudah ada yaitu <i>Indonesia National Single Window (INSW)</i>.</p>
--	---------	--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti

2.2. Teori

2.2.1. Kebijakan publik

2.2.1.1. Pengertian kebijakan publik

Apabila berbicara tentang kebijakan publik (*public policy*) maka kita akan berbicara dua istilah yaitu kebijakan (*policy*) dan publik (*public*). Istilah “*public*” yang dikutip dari Widya Karolina 2009 dijelaskan dalam 3 (tiga) konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Artinya, ketiga konotasi tersebut dapat dilihat dalam tiga dimensi subjek, objek dan lingkungan. Lebih diuraikan bahwa dapat dilihat dari dimensi subjek, kebijakan publik adalah kegiatan pemerintah karena dari pemerintah dianggap sebagai kebijakan resmi, dengan demikian

mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Sedangkan dalam dimensi objek, publik dapat dianggap sebagai pemerintah, masyarakat dan umum karena memang kebijakan dapat diperuntukkan untuk ketiganya atau salah satunya.

Teori-teori kebijakan publik dikutip dari Erwindra Rachman, 2003: James E. Anderson (1979:3) mendefinisikannya:

“A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern (serangkaian tindakan mempunyai tujuan tertentu yang diikuti oleh seorang pelaku atau kelompok kecil pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu)”.

Thomas R. Dye dalam *Understanding Public Policy* (1978:3) menyatakan:

“Public Policy is whatever governments choose to do or not to do (kebijakan publik adalah pilihan pemerintah baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu)”.

W. I Jenkins (1978:15) dalam *policy analysis* mendefinisikan pengertian kebijakan publik secara lengkap

“Public Policy is a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actor concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where this decision should, in principle, be within the power of this actors to achieve (kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh seorang politisi atau sekelompok politik berkaitan dengan tujuan tertentu dan cara-cara mencapainya dalam situasi dimana keputusan tersebut masih dalam batas kewenangan kekuasaan pelaku politik tersebut)”.

Sedangkan kebijakan publik menurut Dunn sebagaimana dikutip oleh Syamsi dikatakan *“public policy is authoritative guide for carrying out governmental action is national, state, regional and municipal jurisdiction”*. Menurut Dunn (2003), kebijakan publik adalah suatu pedoman dalam melaksanakan berbagai macam tindakan pemerintah mulai dari tingkat negara, propinsi, sampai dengan tingkat kabupaten kota.

Batasan atau definisi mengenai kebijakan publik telah banyak diberikan para ahli sesuai dengan pandangannya masing-masing. Harold Laswell mendefinisikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goals, values, and practice* (program tujuan, nilai, dan kebiasaan). Easton (1965, 212) mendefinisikannya sebagai *government action to address some problem* (tindakan pemerintah untuk mengatasi beberapa masalah).

Dari definisi-definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para pakar tersebut diatas, maka pada dasarnya kebijakan tersebut terdiri dari unsur pembuat kebijakan, program-program atau rangkaian kegiatan atau tindakan tertentu, yang dimaksudkan untuk dapat mengatasi suatu masalah tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, berusaha untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi maupun membuat kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki keadaan di masa mendatang.

2.2.1.2. Proses kebijakan

Agar satu kebijakan dapat berjalan secara efektif, sebelum dilakukan perumusan kebijakan haruslah terlebih dahulu dilakukan analisis kebijakan dalam proses kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis (Dunn, 2003, p.22).

Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan.

Aplikasi prosedur dapat membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan secara langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap, yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap, yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kinerja tahap-tahap berikutnya. Aktivitas yang termasuk dalam aplikasi prosedur analisis kebijakan. Adapun prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe kebijakan.

a. Perumusan masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi

masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan yang memungkinkan, dan merancang peluang-peluang baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative kebijakan. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan, mengestimasi sebagai akibat dari kebijakan yang diusulkan, dan mengenai kendala-kendala yang mungkin terjadi.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi sebagai akibat yang diusulkan, dan mengenai kendala-kendala yang mungkin terjadi.

d. Pemantauan

Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Pemantauan menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

e. Penilaian

Evaluasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian anatar kinerja kerja yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan. Pada tahap penilaian kebijakan. Evaluasi menghasilkan seberapa jauh masalah telah terselesaikan (Dunn, 2003, p.23-28).

Terdapat 3 bentuk-bentuk mengenai analisis kebijakan yaitu:

1. Analisis kebijakan prospektif, yakni berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan cenderung mencari cara beroperasinya para ekonom, analisis sistem dan peneliti operasi
2. Analisis kebijakan retrospektif, yakni sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan.
3. Analisis kebijakan terintegrasi, yakni bentuk analisis yang mengkombinasi gaya operasi pra praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil.

Dalam proses kebijakan terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yang dikutip dari Erwindra Rachman, 2003:

Charles L.Cochan (1999:39-52) membaginya dalam 5 tahapan yaitu

1. *Problem identification and agenda setting;*
Karakteristik: para pejabat yang akan dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.
2. *Policy formulation and proposal;*
Karakteristik: para pejabat yang dipilih mermuskan alternative kebijakan uantuk mengatsi masalah.
3. *Adoption;*
Karakteristik: merupakan alternatif yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus, diantara pimpinan lembaga atau keputusan pengadilan.
4. *Implementation and orientation;*
Karakteristik: kebijakan yang telah diambil untuk melaksanakan unit-unit yang memobilisasikan sumber daya fianasial dan manusia.
5. *Evaluation.*
Karakteristik: unit-unit pemeriksa dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

1) Proses pemantauan

Pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Pemantauan memainkan 4 fungsi dalam analisis kebijakan (Dunn, 2003, p.510), yakni:

1. Kepatuhan (*compliance*)
2. Pemeriksaan (*auditing*)
3. Akuntansi
4. Ekspansi

Pendekatan yang perlu digunakan untuk pemantauan kebijakan ini adalah (Dunn, 2003, p.520):

1. Pendekatan akuntansi sistem sosial
2. Pendekatan eksperimental sosial
3. Pendekatan pemeriksaan sosial
4. Pendekatan sintesis riset-praktek

Sedangkan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk pemantauan keempat di atas adalah (Dunn, 2003, p.574-592):

1. Sajian grafik, sajian table
2. Angka indeks
3. Analisis waktu berkala terputus
4. Analisis berkala terkontrol
5. Analisis dikontinuitas regresi

2.2.1.3. Perumusan / Formulasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan mulai dari formulasi, implementasi hingga evaluasi. Semua tahapan mempunyai nilai strategis masing-masing, namun dari proses formulasi pokok permasalahan dapat diketahui bagi para pembuat kebijakan.

Peran pertama analisa kebijakan adalah memberikan gambaran yang sederhana namun jelas kepada pengambil keputusan untuk dapat merancang kebijakan publik. Dengan kata lain, jika hasil analisa kebijakan diterima maka kebijakan tidak langsung dibuat karena ada proses yang

tidak kalah penting untuk dilaksanakan, yaitu proses perumusan/formulasi kebijakan publik.

Proses perumusan/formulasi kebijakan merupakan langkah yang dilakukan setelah identifikasi masalah. Perumusan masalah adalah hal pertama yang terpenting, karena inti dari proses formulasi kebijakan adalah merupakan pokok dari permasalahan. Proses ini merupakan inti dari kebijakan publik karena pada proses ini ditentukan batas-batas kebijakan itu sendiri. Masalah publik merupakan suatu kondisi dan atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan pada rakyat, untuk dicarikan cara-cara penanggulangannya (Anderson, 1979).

a. Faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan

Ada dua faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Pertama, mutu dari kebijakan yang dapat dilihat dari substansial kebijakan yang dirumuskan. Hal ini bisa dilihat pada kebenaran mengidentifikasi masalah secara tepat. Kebenaran identifikasi masalah secara tepat artinya masalah yang didetifikasi itu tidak sekedar benar. Adalah arti *possible* (masuk akal), tetapi juga dapat ditangani (*actionable*) dilihat pada berbagai sarana dan kondisi yang ada dan mungkin dapat diusahakan. Kedua, ada dukungan dan strategi kebijakan yang dirumuskan. Tanpa dukungan yang cukup, kebijakan tak dapat diwujudkan.

Bertolak dari keperluan adanya mutu dan dukungan tersebut, pertimbangan strategi yang selalu menyertai para pembuat kebijakan adalah tidak seluruh pertimbangan (perhitungan) dalam perumusan kebijakan dipusatkan pada apa masalahnya dan bagaimana mengatasinya, tetapi juga pada bagaimana mendapatkan dukungan atau legitimasi bagi kebijakan (Jones dalam Abidin, 2004).

b. Tipe formasi kebijakan publik

Tipe dari fomulasi kebijakan erat hubungannya dengan sifat atau bentuk dari kebijakan itu sendiri. Sesuai dengan bentuk atau sifat dari kebijakan itu, dikenakan tiga tipe kebijakan (Jones, 1994) :

1. Tipe formulasi rutin

Sesuai dengan namanya setiap waktu/periode tertentu, dimana proses perumusannya juga terjadi berulang selama masa/periode tertentu. Bentuk dan isi dari kebijakan rutin itu secara umum sama pada periode.

Kemudahan yang dapat diperoleh dalam teknik perumusan kebijakan yang bersifat rutin ini adalah perumusan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, sementara kelemahannya terletak pada kecenderungan yang berlebihan untuk mempermudah tugas perumusan, sehingga mengabaikan perbedaan masalah tertentu yang bersifat khusus yang timbul sewaktu-waktu.

2. Tipe formulasi kias (analog)

Perumusan kebijakan disini dibandingkan dengan rumusan kebijakan lain yang dipandang ada persamaannya. Ada kalanya asumsi persamaannya dikaitkan pada lokasi, kondisi lingkungan sosial, budaya, dan lain-lain. Sekalipun perumusan kebijakan bersifat analogis, tetapi jika semata-mata atas dasar pengalaman tanpa sikap kritis, perumusan akan cenderung mengarah pada perumusan rutinitas.

Dalam kaitan dengan perumusan kebijakan analogis ini, pengalaman memang dapat dijadikan sebagai kriteria bagi pembuat kebijakan, tetapi mesti pengalaman yang sama. Aplikasi dalam tipe ini dilakukan secara kritis-analogis. Artinya orang menggunakan tipe analogi tetapi dengan sikap kritis.

3. Tipe formulasi kreatif

Pada taraf ini perumusan kebijakan merupakan suatu yang baru. Data yang digunakan dalam tipe ini harus cukup obyektif, artinya cara pengumpulan dan pengolahannya tidak subyektif, cara pengambilan keputusan cukup logis atau rasional, prosesnya dapat dijelaskan dan sebagainya. Dalam tipe ini, sifat kebijakan adalah inovatif atau merupakan terobosan-terobosan baru.

Namun demikian bahwa yang dimaksud dengan baru disini tidak berarti sama sekali atau berbeda sama sekali dengan apa yang sudah ada. Setiap kreatifitas atau inovasi tetap bertolak dari apa yang sudah ada sebelumnya.

c. Model formulasi kebijakan publik

Beberapa hal yang penting yang harus ditentukan sebelum memilih model formulasi kebijakan adalah kompleksitasnya isu atau permasalahan serta ketersediaan sumberdaya, khususnya kompetensi sumberdaya manusia ketersediaan waktu

Di lingkungan para pembelajar perumusan kebijakan publik terdapat sejumlah model. Thomas R. Dye (1995) merumuskan model-model tersebut secara lengkap dalam sembilan model formasi kebijakan, yaitu :

1. Model kelembagaan (*Institutional*)

Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Jadi apa pun yang dibuat pemerintah dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Ini adalah model yang paling sempit dan sederhana di dalam formasi kebijakan publik. Model ini mendasarkan kepada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, di dalam formulasi kebijakan. Disebutkan Dye, ada tiga hal yang membenarkan pendekatan ini, fungsi tersebut bersifat universal, dan memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (koersi) dalam kehidupan bersama.

2. Model Proses (*Process*)

Dalam model ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu, kebijakan publik merupakan juga proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan :

Model ini memberitahu kepada kita bagaimana kebijakan dibuat atau seharusnya dibuat, namun kurang memberikan tekanan kepada substansi seperti apa yang harus ada.

3. Model Kelompok (*Group*)

Model pengambilan kebijakan teori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai sebagai titik kesetimbangan (*equilibrium*). Inti gagasannya adalah interaksi di dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik. Di sini individu di dalam kelompok-kelompok kegiatan berinteraksi secara formal dan informal, secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan.

Model teori kelompok sesungguhnya merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang di dalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interatif.

4. Model Elit (*Elite*)

Model teori elit berkembang dari teori elit-massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa didalam setiap masyarakat pasti terdapat 2 kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Teori mengemukakan bahwa kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit-tidak lebih.

Pemimpin (atau elit) pasti mempunyai visi tentang kepemimpinannya, dan kebijakan publik adalah dari karyanya untuk mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan. Tidak ada yang secara mutlak keliru, ini hanya masalah preferensi dari visi elit serta tentang bagaimana tujuan atau cita-cita bangsa yang sudah disepakati akan dijalani melalui jalur yang diyakininya.

Jadi model elit merupakan abstraksi dari proses formasi kebijakan dimana kebijakan publik merupakan perspektif elit politik. Prinsip dasarnya adalah karena setiap elit politik ingin mempertahankan status *quo*, maka kebijakannya menjadi bersifat konservatif. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para elit politik tidaklah berarti selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah kelemahan-kelemahan dari model elit.

5. Model Rasional (*Rational*)

Model teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan politik sebagai *maximim social gain* yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dengan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis.

6. Model inkremental (*Incremental*)

Model inkrementalis pada dasarnya merupakan kritik terhadap model rasional. Dikatakannya, para pembuat kebijakan tidak pernah

melakukan proses yang disyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual, maupun biaya, ada kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibatnya kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, adanya hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan, dan menghindari konflik.

Model ini melihat bahwa kebijakan politik merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan di masa lalu. Model ini dapat dikatakan sebagai model pragmatik/praktis. Pendekatan ini diambil ketika pengambilan kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi, dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif. Sementara itu, pengambil kebijakan dihadapkan kepada ketidakpastian yang muncul di sekelilingnya. Pilihannya adalah melanjutkan kebijakan di masa lalu dengan beberapa modifikasi seperlunya. Pilihan ini biasanya dilakukan oleh pemerintahan yang berada di lingkungan masyarakat yang pluralistik, yang membuatnya tidak mungkin membuat kebijakan baru yang dapat memuaskan semua warga.

Kebijakan ini berusaha mempertahankan kinerja yang telah dicapai. Dalam kondisi tertentu, kebijakan inkrementalis tidak saja terjadi karena keterbatasan sumberdaya melainkan juga karena keberhasilan di masa lalu yang menciptakan rasa puas diri yang berkepanjangan (*complacent*).

7. Model Teori Permainan (*Game Theory*)

Model seperti ini biasanya dicap sebagai model konspiratif. Gagasan pokok dari kebijakan dalam model teori permainan adalah, pertama formasi kebijakan di dalam situasi kompetisi yang intensif, dan kedua para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independen ke independen. Model teori permainan adalah model yang sangat abstrak dan deduktif di dalam formulasi kebijakan. Konsep kunci dari teori permainan adalah strategi, di mana konsep kuncinya bukanlah yang paling optimum namun yang paling aman dari serangan lawan.

Inti dari teori permainan yang terpenting adalah bahwa ia mengakomodasi kenyataan paling riil, bahwa setiap negara, setiap pemerintahan, setiap masyarakat tidak hidup dalam vakum. Ketika kita

mengambil keputusan, maka lingkungan tidak pasif, melainkan membuat keputusan yang bisa menurunkan keefektian keputusan kita. Di sini teori permainan memberikan kontribusi yang paling optimal.

8. Model Pilihan Publik (*Publik Choice*)

Model kebijakan ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Akar kebijakan ini sendiri berakar dari teori ekonomi pilihan publik (*economic of public choice*) yang mengandaikan bahwa manusia adalah homo economicus yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan.

Pada intinya, setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna (*beneficiaries* atau *customer* dalam konsep bisnis). Proses formulasi kebijakan politik dengan demikian melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Secara umum ini adalah konsep formulasi kebijakan publik yang paling demokratis karena memberi ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan.

Model kebijakan publik ini, mesti ideal dalam konteks demokrasi dan kontrak sosial, namun memiliki kelemahan pokok didalam realitas itu sendiri, karena interaksi akan terbatas pada publik yang mempunyai akses dan di sisi lain terdapat kecenderungan dari pemerintah untuk memuaskan pemilihnya dari pada masyarakat luas. Tidak jarang kita melihat kebijakan politik yang tampak adil namun apabila dikaji, ia hanya menguntungkan sejumlah kecil warga atau kelompok saja. Model ini sesuai, namun ada *ceteris paribus*-nya, yaitu apabila sudah tercapai kondisi kesetaraan yang tinggi di antara masyarakat.

9. Model Sistem (*System*)

Dalam pendekatan ini dikenal tiga komponen : input, proses dan output). Salah satu kelemahan dari pendekatan ini adalah terpusatnya perpusatnya perhatian para tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, dan pada akhirnya kita kehilangan perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah.

Model ini merupakan model yang paling sederhana namun cukup komprehensif, meski tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan atau formulasi kebijakan publik.

2.2.2. Administrasi

Pengertian administrasi menurut Prajudi Atmosudirdjo dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Administrasi dalam pengertian sempit, yaitu berarti tata usaha atau *clerical work*, yang meliputi: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, dan sebagainya. Jadi tata usaha adalah bagian kecil kegiatan dari pada ilmu administrasi.
2. Administrasi dalam pengertian luas dapat ditinjau dari 3 sudut, yaitu proses, fungsi, dan kepranataan (*institution*). Prajudi atmosudirdjo, dasar-dasar ilmu administrasi, (Jakarta: galia indonesia, 1985) hal. 13-15

Pengertian administrasi dalam arti luas menurut Leonard D. White sebagai berikut: *administrastion is process common to all group effort, public or private, civil or military, large or small scale ... etc*". Leonard D. White: introduction to the study of public administration, (new york: MacMillan Co., 1985), p.1.

Sedangkan administrasi menurut William H. Newman mengemukakan: *"administation has been defined as the guidance, leadership and control of the effort of a group of individuals towards some common goal"*. The Liang Gie, kamus administrasi perkantoran, (yogyakarta: nur cahya, 1979), hal 80. Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan daripada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama.

Berdasarkan definisi-definisi administrasi diatas, memperlihatkan bahwa administasi merupakan kelompok yang terdiri dari atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama yang melakukan kegiatan atau proses dengan adanya bimbingan untuk tercapainya suatu tujuan.

Pengertian prosedur menurut kamus administrasi perkantoran adalah: suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan. Misalnya prosedur membuat surat pada suatu perusahaan. Dalam kegiatan ini terdapat suatu rangkaian ketentuan-ketentuan mengenai cara menyusun konsep suratnya, cara mengetik pada kertas surat, atau cara menakliknya yang semuanya telah pasti. Rangkaian prosedur menjadi suatu sistem. The Liang Gie, kamus administrasi perkantoran, (yogyakarta: nur cahya, 1979) hal.80.

Pengertian pelayanan prima secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang tertuju pada pengguna jasa (Client).
2. Faktor Kunci dalam keberhasilan dari setiap jenis kegiatan suatu entitas/perusahaan.
3. Cara atau teknik dalam memberikan pelayanan yang dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan Client dengan mengedepankan prinsip-prinsip *customer service satisfaction*.

Pengertian pelayanan prima pada KPU BC yang diambil dari Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Client Coordinator hal. 83 adalah salah satu bentuk layanan unggulan yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanean dan cukai yang di implementasikan dalam bentuk pelayanan yang cepat dan responsive terhadap kebutuhan pengguna jasa kepabeanean (Client), kinerja yang cepat, murah, lebih baik, terawasi, dan terukur, serta sumber daya manusia yang berintegritas dan bebas KKN (Korupsi, kolusi dan Nepotisme).

2.2.3. Pajak atas lalu lintas barang

2.2.3.1. Impor dan ekspor

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeaan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum. Perdagangan terebut dapat disebut sebagai perdagangan impor apabila barang yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kebutuhan pabeaan dan saat pembayaran bea masuk terutang. Akan tetapi, untuk memudahkan

pengawasan garis Negara ditarik ke pelabuhan-pelabuhan untuk barang-barang impor dan ekspor (Purwito, 2008, p. 112)

Tujuan utama kebijakan impor adalah untuk melindungi industri di dalam negeri terhadap persaingan barang-barang impor. Karena itu kebijakan impor sering disebut kebijakan proteksi. Banyak literatur mengenai perdagangan internasional mengatakan bahwa perdagangan tanpa proteksi (*free market*) yang sepenuhnya didasarkan pada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif akan meminimalisasi output dan kesejahteraan dunia (*gains from trade*). Artinya, kebijakan impor yang bersifat proteksi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas, pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak, tidak hanya Negara eksportir tetapi juga negara importir (Purwito, 2008, p. 158).

Pengertian ekspor diartikan sebagai pengangkutan barang dalam jumlah tertentu dari satu Negara ke Negara lain baik untuk diperdagangkan maupun untuk tidak diperdagangkan dengan memenuhi kewajiban pabean yang telah ditentukan. Pengangkutan barang tersebut dapat dilakukan melalui udara, laut, maupun darat, dan melintasi batas-batas Negara, dengan dilengkapi dengan dokumen eksor. Disebagian Negara, ekspor atas barang-barang tertentu barang dapat dikenakan pajak ekspor atau bea keluar. Kegiatan ekspor di beberapa Negara mendapatkan fasilitas yang bertujuan untuk mendapatkan devisa atau memperkuat cadangan devisa atau meningkatkan cadangan devisa atau meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional (Purwito, 2008, p. 130)

2.2.3.2. Penimbunan

Terhadap barang ekspor-impor yang belum memenuhi kewajiban kepabeanan, dapat dilakukan penimbunan barang yang berada di bawah pengawasan pabean. Tempat penimbunan barang di bawah pengawasan tersebut di lokasi pengusaha dan ruangan tertutup atau terbuka yang disetujui oleh pabean sambil menunggu pengajuan Pemberitahuan Barang.

Persyaratan bangunan, tata letak, dan pengolahan tempat penimbunan sementara dan tata cara pengaturan penimbunan barang, tata cara pencatatan

persediaan barang dan pembukuan serta tata cara pengawasan pabean yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Konvensi Kyoto yang menyatakan *the Customs shall lay down the requirements as regard the construction, layout and management of temporary stores and the arrangements for the storage of goods, for stock-keeping and accounting and for Customs control.*

2.2.3.3. Transportasi

Perkembangan pola dan sistem pengangkutan mengikuti perkembangan perdagangan dan teknik perdagangan internasional atau didasarkan atau azas “*ship follows the trade*” atau pengangkutan mengikuti mengikuti dan terkait dengan perkembangan internasional. Jenis-jenis pengangkutan seperti:

- Pengangkutan darat (*land transport*), umumnya berlaku untuk pengangkutan di benua Eropa, Amerika, Asia yang mempunyai perbatasan darat;
- Pengangkutan laut (*sea transport*), yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan dapat dibedakan antara: (1) pelayaran tetap (*regular line service*), dengan jadwal pelayaran tertentu dan teratur tarif angkutan yang pasti dan pembuatan perjanjian angkutan, (2) pelayaran tidak tetap (*tramp line*, yang merupakan suatu bentuk pelayaran bebas, yang tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan formal apa pun dan dipergunakan untuk mengangkut semua jenis barang.
- Pengangkutan multimoda (*all modes transport*), mempunyai pengertian seperti dalam *uniform rules for a combined transport document ICC* nomor 298, adalah: “Pengangkutan barang yang mempergunakan sekurang-kurangnya dua alat angkut yang berbeda dari suatu tempat yang terletak dalam suatu negara lain, dengan mempergunakan lebih dari satu modus pengangkutan yang berbeda”. Aplikasi dan kondisi penyerahan barang (*Incoterm*) adalah All Models Transport (A.M.T).

Pengertian *Intermodal Freight Transport* menurut Wikipedia adalah: “*Intermodal freight transport involves the transportation of freight in an intermodal container or vehicle, using multiple modes of transportation (rail, ship, and truck), without any handling of the freight itself when*

changing modes. The method reduces cargo handling, and so improves security, reduces damages and losses, and allows freight to be transported faster. Reduced costs over road trucking are the key benefit for intracontinental use. This may be offset by reduced timings for road transport over shorter distances.”

Pengertian Intermoda angkutan barang menurut Wikipedia adalah: Intermoda transportasi angkutan melibatkan transportasi angkutan dalam wadah intermoda atau kendaraan, menggunakan beberapa mode transportasi (kereta, kapal, dan truk), tanpa penanganan barang ketika mengubah mode. Metode ini mengurangi penanganan kargo, dan meningkatkan keamanan, mengurangi kerusakan dan kerugian, dan memungkinkan pengangkutan untuk diangkut lebih cepat. Mengurangi biaya perjalanan truk adalah manfaat kunci untuk digunakan di intracontinental. Hal ini dapat diimbangi dengan mengurangi waktu transportasi perjalanan jarak pendek.

Pengertian intermodal transport menurut UN/ECE, 2001 adalah *“The movement of goods in one and the same loading unit or road vehicle, which uses successively two or more modes of transport without handling the goods themselves in changing modes”*

Pengertian transportasi intermod menurut PBB / ECE, 2001 adalah "Gerakan barang dalam satu dan unit pemuatan yang sama atau kendaraan, yang menggunakan dua atau lebih moda transportasi tanpa penanganan barang sendiri dalam perubahan mode"

Menurut UN/ECE, 2001 *Combined Transport is intermodal transport where the major part of the European journey is by rail, inland waterways or sea and any initial and/or final leg carried out by road are as short as possible.”* Menurut UN/ECE, 2001 *Combined Transport is intermodal transport where the major part of the European journey is by rail, inland waterways or sea and any initial and/or final leg carried out by road are as short as possible.”*

Seperti yang dikutip dari *The New Urban Acupuncture: Intermodal Nodes between Theory and Practice* Aleksandra Stupar, Vladimir Savcic.

“The idea of intermodality derives its logic from the complex traffic systems and represents one of the main pivots of the contemporary planning practice. Generating an impressive architectural program, it directs design and organization of sensitive urban areas playing an important role in modern cities. However, this term is frequently related to the traffic nodes – terminals, even though it could be embedded and/or applied in various categories of urban systems and on different levels and scales of design process.

Ide intermodality logika berasal dari sistem lalu lintas yang kompleks dan merupakan salah satu pivots utama dari praktek perencanaan kontemporer. Membangkitkan program arsitektur mengesankan, ia mengarahkan desain dan organisasi daerah perkotaan sensitif memainkan peran penting di kota-kota modern. Namun, istilah ini sering berhubungan dengan node lalu lintas - terminal, meskipun bisa tertanam dan / atau diterapkan dalam berbagai kategori sistem perkotaan dan pada tingkat yang berbeda dan skala dari proses desain.

The contemporary intermodal nodes could be classified according to various criteria:

- importance for local, regional and global connectivity*
- position in a metropolitan/urban networking*
- spatial structure*
- functional structure*
- mode(s) of transportation*
- applied technology*
- level of planned/achieved sustainability*
- level of integration*

Para intermoda kontemporer node dapat diklasifikasikan menurut berbagai kriteria:

- penting untuk konektivitas lokal, regional dan global
- posisi dalam jaringan metropolitan / perkotaan
- Struktur spasial
- Struktur fungsional
- Mode (s) transportasi

- menerapkan teknologi
- tingkat keberlanjutan yang direncanakan / dicapai
- tingkat integrasi

In general, intermodal nodes with their traffic networks, complementary activities and surrounding (service) zones could represent:

- *local connectors (networking on a metropolitan scale, local service center)*
- *regional connectors (intersection of several regional transportation networks, inter-metropolitan links, service center on a regional level)*
- *global connectors (the main intermodal hub of major regional networks, interregional/global service center).*

Secara umum, node intermodal dengan jaringan lalu lintas, kegiatan saling melengkapi dan sekitarnya (layanan) zona bisa mewakili:

- lokal konektor (jaringan pada pusat, skala layanan metropolitan lokal)
- daerah konektor (persimpangan dari beberapa jaringan transportasi regional, antar-link metropolitan, pusat layanan di tingkat regional)
- global yang konektor (pusat intermoda utama dari jaringan regional yang besar, interregional / global pusat layanan).

Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut dari luar daerah pabean yang tidak dipelabuhan bongkar atau pengakutan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam daerah pabean yang mengangkut barang-barang impor, wajib diberitahukan pabean, sepanjang mengenai:

- a. Barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penumbunan Berikat lain,
- b. Barang impor yang diangkut terus dan atau diangkut lanjut,
- c. Barang ekspor diangkut terus dan atau diangkut lanjut,

- d. Barang dari Daerah Pabean yang mengangkutnya melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean

2.2.5. Teori Manajemen Arus Barang

Definisi oleh the Council of Logistics Management :

Supply Chain Management is the systematic, strategic coordination of the traditional business functions within a particular company and across businesses within the supply chain for the purpose of improving the long-term performance of the individual company and the supply chain as a whole. Definisi oleh Dewan Manajemen Logistik adalah Pasokan Rantai management adalah koordinasi sistematis, strategis dari fungsi bisnis tradisional dalam perusahaan tertentu dan di seluruh perusahaan dalam rantai pasokan untuk tujuan memperbaiki kinerja jangka panjang perusahaan individu dan rantai pasokan secara keseluruhan.

Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu dan dengan kualitas yang bagus.

Definisi manajemen supply chain adalah *supply chain management of upstream and downstream relationship with suppliers and customers to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole.* (Martin Christopher, 1998). Definisi Manajemen rantai suplai manajemen rantai suplai adalah hubungan hulu dan hilir dengan pemasok dan pelanggan untuk memberikan nilai pelanggan yang unggul dengan biaya lebih sedikit untuk rantai pasokan secara keseluruhan. (Martin Christopher, 1998).

Manajemen *supply chain* menyangkut:

1. Pengelolaan arus barang atau jasa.
2. Pengelolaan mengenai pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang.
3. Sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang.

Karena, seperti dijelaskan diatas, pada hakekatnya suatu *supply chain* adalah suatu jaringan. Maka, dalam mengembangkan ide ini, *supply chain* juga dapat didefinisikan sebagai berikut: *Supply chain is a network of connected and interdependent organization mutually and co-operatively working together to control, manage and improve the flow of materials and information from suppliers to end users (source: J. Aitken)*. Karena, seperti dijelaskan diatas, pada hakekatnya suatu rantai pasokan adalah suatu Jaringan. Maka, Dalam, mengembangkan ide ini, rantai pasokan juga dapat didefinisikan sebagai berikut: Supply chain adalah jaringan organisasi terhubung dan saling tergantung saling dan co-operatively bekerja sama untuk mengontrol, mengelola dan memperbaiki aliran bahan dan informasi dari pemasok ke pengguna akhir (sumber: J. Aitken)

Michael Porter memberikan pandangan akan pentingnya relativitas kompetitif (*competitive relativities*):

“competitive advantage cannot be understood bu looking at a firm as a whole. It stems from many discrete activities a firm performs in designing, producing, marketing, delivering ang supporting its product. Each of these activities can contribute to a firm’s relative cost position and create a basis for differentiation.. The value chain disaggregates a firm into its strategically relevant activities in order to understand the behavior of costs and the existing and potential sources of differentiation. A firm gain competitive advantage by performing these strategically important activities more cheaply or better than its competitors. (Michael E. Porter, 1985).

Michael Porter memberikan Pandangan Akan pentingnya kompetitif relativitas (relativitas kompetitif): keunggulan kompetitif tidak dapat dipahami bu melihat perusahaan secara keseluruhan. Ia berasal dari aktivitas diskrit banyak perusahaan melakukan dalam merancang, memproduksi, pemasaran, memberikan ang mendukung produknya. Setiap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi ke posisi biaya relatif perusahaan dan menciptakan dasar untuk diferensiasi .. Disaggregates rantai nilai perusahaan ke dalam kegiatan yang strategis yang relevan untuk memahami perilaku biaya dan sumber-sumber yang ada dan potensi diferensiasi. Keuntungan perusahaan keunggulan kompetitif dengan melakukan

kegiatan-kegiatan strategis yang penting lebih murah atau lebih baik dari pesaingnya. (Michael E. Porter, 1985)

Aktivitas *value chain* dapat dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu *primary activities* (*inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales services*), dan *support activities* (*infrastructure, human resource management, technology development and procurement*). Aktivitas ini dilukiskan seperti pada Gambar 10. Perlu dicermati bahwa di sini jelas-jelas *logistic activities*, dan bukan *support activities* seperti yang masih diyakini oleh beberapa manajer, sedangkan *procurement* masuk dalam *support activities*.

Support activities adalah fungsi-fungsi terintegratif yang berlangsung di setiap *primary activities* di dalam perusahaan. Keuntungan kompetitif dihasilkan dari cara suatu perusahaan mengorganisir dan melaksanakan fungsi yang tersembunyi ini dalam perusahaannya. Untuk mendapatkan keuntungan kompetitif yang lebih unggul dari kompetitornya, suatu perusahaan yang menghasilkan nilai tertentu bagi para konsumennya dengan cara menghasilkan kinerja yang lebih efisien dan lebih dibandingkan dengan kompetitornya.

2.2.6 Teori Organisasi

Konsep sistem organisasi di atas adalah lebih mengarah pada perspektif sistem terbuka karena organisasi harus memutuhkan sesuatu dari lingkungannya dan memberikan sesuatu kepada lingkungannya. Lebih jelas diartikan bahwa "*Organization as an open system- a system that takes in resources from external environment and converts or transform them into goods and services that are sent back to that environment, where they are bought by customers.*(Jones et. all, p.61, 2000). Berkaitan dengan hal tersebut, P.Y.K Chau and KY.Tam memberikan ciri-ciri open system sebagai berikut : Suatu lingkungan sistem terbuka (*An open system environment*) adalah komprehensif dan terdiri standar teknologi informasi internasional dan profil standar fungsional yang menentukan interfaces, jasa dan format pendukung untuk mencapai inleroperability atau kemudahan aplikasi, data dan manusia.

Sistem terbuka dapat dipandang sebagai inovasi organisasional yang membutuhkan inovasi tehnik dan administrasi. Perobahan dalam prosedur administrasi bersamaan dengan mengadopsi sistem terbuka mengharuskan adopsi

suatu inovasi administrasi. Adopsi sistem terbuka mengharuskan suatu organisasi untuk: merevisi prosedur-prosedur dalam menghadapi kebutuhan perangkat lunak/keras, alokasi sumberdaya, pelatihan staf, dan operasi dan manajemen (P.Y.K Chau, KY.Tam, p.229-239, 2000).

Dengan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa suatu organisasi sebagai sebuah sistem terbuka, mencapai eksistensinya dari sebuah sistem lingkungan yang lebih besar, dan sebaliknya ia harus mengabdikan kepada nilai-nilai sosial-manusia lingkungannya. Lingkungan keorganisasian itu sendiri juga merupakan sebuah sistem terbuka dan dinamik. Sebagai sistem, baik organisasi maupun lingkungannya memperlihatkan sifat-sifat sistematis dasar yang kita kenal pada uraian-uraian sebelumnya tentang sistem. Didalamnya termasuk :

- Perilaku dengan tujuan tertentu
- Holisme
- Keterbukaan
- Transformasi
- Keterkaitan satu sama lain
- Pengawasan dan pengendalian" (Winardi, Peng. Manajemen, hal.132)

2.2.7 Teori Sistem Informasi Manajemen

Sistem menurut Gordon B. Davis adalah terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud (Davis, 1995, hal.68). Informasi menurut Gordon B. Davis adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau yang akan datang (Davis, 1995, hal.28).

Sistem Informasi Manajemen menurut Gordon B. Davis adalah sebuah sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Davis, 1995, hal.3)

Sistem informasi manajemen (management information system atau sering dikenal dengan singkatannya MIS) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. SIM (sistem informasi manajemen) dapat

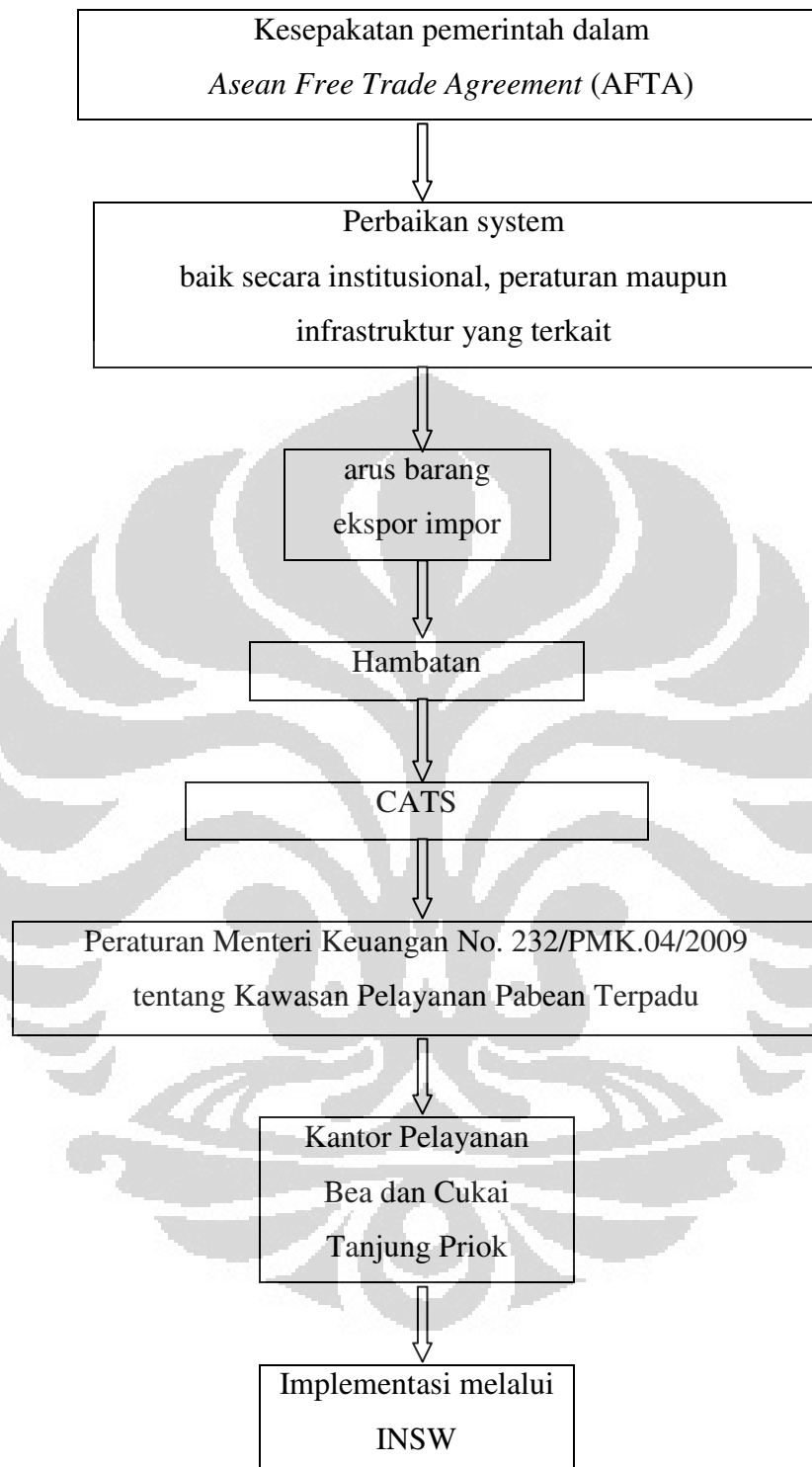
didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Semua sistem-sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah (lower level management), manajemen tingkat menengah (middle level management) dan manajemen tingkat atas (top level management).

A system is an organized or complex whole: an assemblage or combination of things or parts forming a complex or unitary whole. (Johnson et. al, p.5,1973). Selanjutnya menurut Ludwig Von Bertalanffy, "*Systems are complexes of elements standing in interaction. A system is a complex of interacting elements. Systems are complexes of elements in interactions, to which certain laws can be applied*". (Disarikan oleh Winardi, Pengantar Teori Sistem dan Analisis Sistem, hal.129, 1980). Sedangkan AD. Hall / Refagen mendefinisikan sebagai berikut : *A system is a set of objects together with relationships between the objects and between their attributes.* (hal.129).

Dari berbagai definisi di atas dapat dikatakan bahwa suatu sistem adalah merupakan kumpulan dari objek-objek bersama-sama dengan hubungannya, antara objek-objek dan antara atribut mereka yang dihubungkan dengan satu sama lain dan kepada lingkungannya sehingga membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh (Whole). Untuk lebih menjelaskan arti menyeluruh dari berbagai definisi di atas, berikut ini akan diuraikan lebih lengkap unsur-unsur dari definisi tersebut antara lain, kumpulan, objek, hubungan, atribut, lingkungan, dan menyeluruh.

2.3 Kerangka pemikiran

Demi tercapainya kemajuan perekonomian yang ingin dicapai, pemerintah Indonesia perlu mengambil serangkaian langkah dan kebijakan serta perbaikan-perbaikan pada bidang sistem informasi.

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (sugiyono, 2009,p.2). Di sisi lain, metode penelitian mendeskripsikan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (hasan, 2002, p.21). Metode penelitian adalah bagian yang penting dari proses penelitian. Metode penelitian ini membahas konsep teoritik dan berbagi metode penelitian, memberikan suatu hasil pelaksanaan pada program kerja kebijakan. Metode penelitian adalah bagian yang penting dari proses penelitian. Dalam sub-bab ini, metode dan strategi penelitian yang dijabarkan anatar lain: pendekatan penelitian, jenis atau tipe penelitian, hipotesis kerja, nara sumber atau informan, proses penelitian, penentuan site penelitian dan batasan penelitian.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan tema yang diangkat dalam skripsi berusaha mengedepankan penjelasan yang mendalam akan suatu proses hasil tindakan. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Creswell mengatakan, bahwa bisa saja sejak awal, sebelum melakukan penelitian peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif mengemukakan teori dari berbagai kajian literatur (Jhon W. Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach* (California: Sage Publication, 1994) Hal.3). Teori dan konsep ini akan dibandingkan dengan

fenomena atau gejala yang terjadi, apakah sesuai atau terdapat anomali. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena ditujukan untuk mencoba menemukan suatu fenomena yang sedang terjadi ditengah masyarakat.

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pendekatan kualitatif. Proses penelitian ini bersifat induktif, yaitu peneliti mulai melakukan penelitian dengan topik yang umum & sejalan dengan pengumpulan data awal & analisis sementara. Peneliti kualitatif dapat memformulasikan pertanyaan penelitian hingga fokus. Hal ini sejalan dengan pertanyaan penelitian kualitatif, dimana pertanyaan dimulai dengan 2 hal bersifat umum (*grand tour question*) kemudian dijabarkan mulai pertanyaan yang bersifat khusus (*subsequent question*). Peneliti kualitatif lebih mengutamakan proses penelitian maka tahapan penelitian berupa pola non linear atau *cyclical*, dimana peneliti dapat kembali kepada tahapan sebelumnya sampai diperoleh hasil yang optimal sehingga tahapan penelitian berbentuk pola lingkaran.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dikategorikan kedalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, dan tehnik pengumpulan data.

- a. Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Selanjutnya Nazir menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap. Pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena (oejono, Abdurrahman, 2005, p.25).

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena peneliti mencoba untuk menggambarkan secara lebih detail mengenai formulasi kebijakan *Customs Advance Trade system (CATS)* dan implementasi *Indonesia National Single Window (INSW)* sebagai salah satu upaya dalam mendukung kelancaran arus barang.

- b. Berdasarkan manfaatnya, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian murni dengan karakteristik peneliti secara bebas memilih permasalahan dan subjek penelitian. Penelitian diadakan berdasarkan norma absolut penelitian dan standar pemberian beasiswa yang dicari, tujuan yang utama adalah untuk menyumbangkan pengetahuan teoritis dasar. Sebagaimana pemikiran Creswell mengenai karakteristik penelitian murni yang dikutip dari Dhini C (2008, p.44), yaitu:

“Research problem and subjects are selected with a great deal of freedom, research is judge by absolute norm of scientific rigor, and the highest standarts of scholarship are sought and the driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge”.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pemerintah serta pengusaha khususnya pengusaha yang membutuhkan perputaran uang yang cepat untuk dapat digunakan sebagai modal usahanya.

- c. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong *cross-sectional research*, karena penelitian ini dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan. Berdasarkan definisi tersebut, penelitian *cross sectional* dilakukan hanya dalam satu waktu saja, meskipun wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan.
- d. Berdasarkan tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumplan data yang digunakan adalah:

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Untuk studi kepustakaan, peneliti mempelajari dan menelaah berbagai literature (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, website, dan lain-lain) dalam menghimpun sebanyak amungkin ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokoik permasalahan yang diteliti.

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan dua cara:

Pertama, dengan observasi. Wawancara adalah percakaan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Meleong, 2004, p. 186). Wawancara dilakukan dengan informan dimana peneliti memiliki sejumlah pertanyaan dengan informan dimana peneliti memiliki sejumlah pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai permasalahan yang diangkat.

Kedua, dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara adalah digunakan untuk mengumpulkan data primer dan informasi dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti juga melakukan pencarian data sekunder yang mendukung formulasi kebijakan Customs Advance Trade System (CATS).

e. Berdasarkan tehnik analisis data

Penelitian yang dilakukan menggunakan tehnik analisis data kualitatif. Dalam menganalisis temuan lapangan, peneliti hanya akan mengemukakan gambaran, data dan analisa yang dirasa penting untuk diketahui orang lain atau para pembaca penelitian ini.

Berdasarkan tujuan secara umum, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu apakah Customs Advance Trade System dapat mewujudkan kelancaran arus barang serta kendala & bagaimana penyelesaian masalah yang diambil dalam pelaksanaan system ini.

Narasumber atau informan yang dihadirkan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai *key informant*, yang sengaja dipilih oleh peneliti. Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti (Bungin, 2003, p. 53). Informan yang akan dipilih oleh penulis adalah pihak-pihak yang betul-betul menguasai hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan dapat memberikan data yang dibutuhkan sehingga hasil penelitian dapat diambil dengan lebih akurat.

Informan yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan kebijakan atau dapat digolongkan sebagai *key*

informant, yang sengaja dipilih oleh peneliti. Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti.

Wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memakai beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neumann dalam bukunya, yaitu “*The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant*”.

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menghadirkan beberapa informan yang menurut peneliti dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian tentang formulasi kebijakan Customs Advance Trade System (CATS) dan implementasi *Indonesia National Single Window* (INSW) sebagai salah satu upaya dalam mendukung kelancaran arus barang. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Robert Marbun, Kepala Sub Direktorat KITE & TPB Bid. Fasilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. PT. Kawasan Berikat Nusantara, Unit Bersama Kawasan Marunda
3. Sucofindo
4. KPP BC Tanjung Priok
5. KPP BC Bekasi, bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi

3.4 Proses Penelitian

Peneliti akan menjabarkan proses penelitian dimulai dari pemilihan topik hingga ke kerangka pemikiran dan metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan laporan penelitian ini.

a. Pemilihan Topik

Isinya latar belakang penulisan, kondisi perekonomian yang mendorong mengambil tema ini.

b. Pendahuluan

Penulisan skripsi ini dimulai dengan pendahuluan. Latar belakang masalah disajikan dengan gambaran mengapa suatu penelitian menarik untuk diteliti alat bantu yang digunakan adalah 5W, 1H (*what, who, when, where, why and how*). Dengan alat bantu tersebut, peneliti menemukan fenomena yang terkait sehubungan banyaknya prosentase

penumpukan barang yang terhambat dalam proses penanganannya. Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dianalisis lebih dalam.

c. Tinjauan pustaka dan metode penelitian

Proses selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memulai tinjauan pustaka berupa kajian literature dari perpustakaan, pencarian artikel, melalui media cetak dan elektronik. Setelah melengkapi tinjauan pustaka, peneliti melanjutkan ke tahap metode penelitian, dengan menjabarkan pendekatan penelitian dan alasan peneliti memilih pendekatan tersebut, menentukan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, menentukan narasumber dan informan, menjabarkan proses penelitian, dan menentukan site penelitian.

d. Pengumpulan data dan turun lapangan

Pengumpulan data di lapangan dilakukan peneliti dengan mengumpulkan informasi dan data yang terkait dengan ndus penelitian pada objek penelitian. Data yang diperoleh peneliti berupa data kuantitatif analisis data tanpa menggunakan rumus statistik. Untuk dapat memahami lebih jauh mengenai topik penelitian, peneliti mulai menyusun daftar wawancara mendalam kepada pihak ahli dibidangnya yang mnyangkut dengan topik penelitian.

e. Analisis masalah

Peneliti mengolah data yang dikumpulkan oleh peneliti data primer dari hasil wawancara atau data pendukung yang diterima dari para pihak yang terkait. Dari data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan analisis sesuai dengan pertanyaan masalah yang diangkat sesuai dengan fenomena yang ada.

f. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian, peneliti memberikan kesimpulan yang berisi secara garis besar hasil dari penelitian. Peneliti juga memberi saran yang berguna bagi pihak terkait.

3.5 Penentuan Site Penelitian

Site penelitian dari peneliti adalah pihak-pihak yang terkait dengan proses Formulasi kebijakan *Customs Advance Trade System (CATS)*, dan pihak lainnya yang mendukung proses penelitian. Dari pihak pemerintah selaku *policy maker* dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3.6 Batasan Penelitian

Penulis dalam mengerjakan penelitian ini mengalami keterbatasan dalam hal waktu yang tidak banyak, sehingga dalam pengumpulan data kurang optimal baik dalam pencarian data yaitu melalui buku-buku yang diperoleh di perpustakaan, artikel di majalah dan koran dan lain sebagainya. Topik permasalahan yang diangkat oleh penulis juga merupakan suatu topik yang tidak familiar sehingga membutuhkan pembelajaran maksimal dari penulis untuk memahami fenomena yang ada. Dalam pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, dimana informan sangat sulit untuk ditemui karena kesibukan serta panjangnya birokrasi yang dilakukan. Upaya yang dilakukan peneliti untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan mengatur waktu pengumpulan data menyesuaikan kondisi dan waktu informan, serta mengajukan pertanyaan sedemikian rupa (secara praktek pada umumnya) sehingga tidak memberatkan informan dalam pemberian informasi dan data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN UTAMA TANJUNG PRIOK DAN CUSTOMS ADVANCE TRADE SYSTEM (CATS)

4.1 Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 68/PMK.01/2007 tanggal 27 Juni 2007, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok yang berkedudukan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan serta audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok seperti tersebut, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan teknis dibidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Pelaksanaan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
5. Pelaksanaan intelijen, patrol, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding;
7. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
8. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
9. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
10. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api;

11. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja;
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Visi : Menjadi kantor percontohan bagi peningkatan kinerja dan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Misi : Memberikan pelayanan prima dan melaksanakan pengawasan yang efektif kepada industri, perdagangan dan masyarakat.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi organisasi perlu ditetapkan tujuan dengan perumusan sasaran dan kebijakan, program, kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan yang ditetapkan harus jelas, berjangka waktu dan merupakan jawaban dari prioritas atas permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal.

Tujuan :

1. Mengoptimalkan fungsi DJBC sebagai:
 - a. Fasilitator perdagangan (*trade facilitator*)
 - b. Dukungan industri (*industrial assistance*)
 - c. Penghimpunan penerimaan (*revenue collector*)
 - d. Pelindung masyarakat (*community protector*)
2. Memberikan pelayanan yang cepat, efisien, *responsive* dan transparan berdasarkan prinsip “*Good Governance*”
3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan mitra kerja DJBC
4. Meminimalkan biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai (*Compliance Cost*)

Dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, semua jajaran KPU Tanjung Priok telah sepakat memiliki tekad dan kemauan yang keras dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan performance, sehingga dikristalkan suatu system standar pelayanan prima dengan sasaran:

- a. Terwujudnya pelayanan yang cepat, efisien, *responsive* dan transparan berdasarkan prinsip *good governance*
- b. Tercapainya pengawasan yang efektif
- c. Tercapainya kantor pelayanan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan berintegritas tinggi
- d. Terciptanya hubungan kemitraan dan pengguna jasa

- e. Terwujudnya pelayanan perijinan, fasilitas dan keberatan satu atap
- f. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk mendukung pelayanan dan pengawasan
- g. Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien

Tata nilai unggulan/budaya organisasi KPU yang akan diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah:

1. Menciptakan value “*Customer Satisfaction*”

Memberikan layanan yang melebihi ekspektasi kepuasan pengguna jasa dan memberikan interaksi terbaik, serta memiliki kualitas prima dengan menekankan pada aspek efisien, pasti, responsive dan transparan.

2. Proaktif

Memiliki sifat cepat tanggap dan responsive dalam melayani pengguna jasa dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

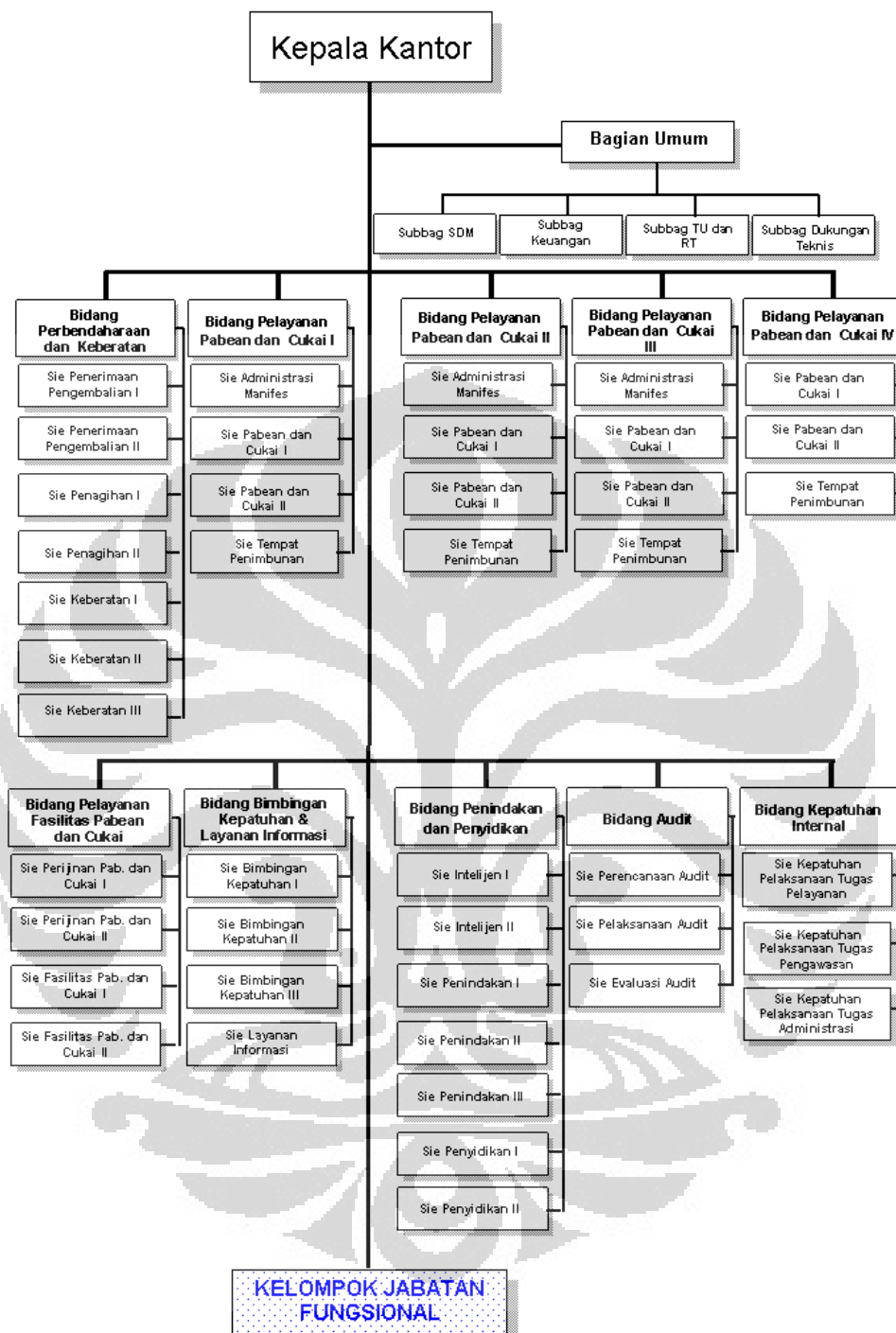
3. Tanggung jawab

Memastikan agar semua perilaku, sikap dan tindakan selalu mengacu pada standard an peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, serta selalu meningkatkan kinerja secara terus menerus.

4. *Case management*

Mengidentifikasi permasalahan sehingga masalah-masalah yang timbul dapat dimonitor dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Tabel 4.1 Struktur Organisasi



Sumber <http://www.beacukai.go.id/>

4.2 *Customs Advance Trade System (CATS)*

Sistem *Customs Advance Trade System (CATS)* merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh DJBC dalam rangka mempercepat arus barang di KPU Tanjung Priok. CATS melakukan perubahan atas sistem pelayanan dan pengawasan yang telah ada dengan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur teknologi informasi dalam rekayasa bisnis proses yang ada. Melalui sistem ini sistem pelayanan maupun pengawasan yang saat ini masih menitikberatkan pada proses manual seperti pemeriksaan fisik atas dokumen dan barang akan berkurang dengan digunakannya piranti dan infrastruktur IT.

Dari berbagai masalah yang ada, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menawarkan solusi yang bersifat *quick win* dengan pendekatan biaya minimum (*minimizing cost*) dan optimasi waktu yang diperlukan dalam rangka implementasi, serta dalam penyesuaian terhadap peraturan terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penerapan *Customs Advance Trade System (CATS)*, maka dapat ditetapkan prioritas untuk memberi solusi terhadap masalah logistik terutama yang berhubungan dengan proses *port clearance* dan *customs clearance*.

Secara garis besar CATS adalah:

1. Suatu sistem yang mengintegrasikan *logistics system*, *security system* dan *fleet management system*.
2. Utilisasi *supply-chain management*.
3. Penerapan WCO SAFE Framework dan *Authorized Economic Operator (AEO)*.
4. Penerapan *Container Security Initiative (CSI)/ Customs-Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT)*.
5. Utilisasi *hub-spoke system* dan *inland port*.
6. Rekayasa bisnis proses terkait *customs and port clearances*.
7. Integrasi Transways 4 PL (*Party Logistics*)
8. Mengkombinasikan *less physical inspection* dan optimalisasi penggunaan *information technology*.
9. Sistem pelayanan dan pengawasan prima atas prosedur kepabeanan (ekspor, Tempat Penimbunan Berikat/*bonded zone*).
10. Integrasi *port community*.

11. Penerapan Intermoda Transportation System (*railways, trucking*).
12. Skema tatakerja: B2B, B2G, G2G.
13. Kerjasama antar negara melalui *Customs Mutual Recognition*.

CATS sebagai solusi dari permasalahan yang selama ini terjadi dalam kegiatan ekspor-impor. 5 pilar CATS adalah :

1. *Customs & Port Clearance System* (Hub – Spoke/Inland Port System) dengan menggunakan Kawasan Pelayanan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT),
2. *Transportation System* dengan menerapkan fleet management dalam pengangkutan barang,
3. *Security System* (security & tracking atas barang impor & ekspor),
4. *Information System* (peningkatan kualitas pelayanan & pengawasan kepabeanan dengan IT system),
5. serta sesuai dengan praktek kepabeanan internasional yakni *WCO SAFE Framework, AEO and Mutual Recognition among Customs.*”

Beberapa aspek teknologi yang akan diterapkan dalam implementasi CATS adalah:

1. *Logistics Application Service Provider* (ASP)
2. Penggunaan *Electronic Seal* (eSeal)
3. *Fleet Management System*.
4. Implementasi *Customs Mutual Recognition*

Dasar hukum yang berkaitan dengan system ini adalah:

1. Instruksi Presiden RI No. 01 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu

BAB V

ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN *CUSTOMS ADVANCE TRADE SYSTEM (CATS)* DAN IMPLEMENTASINYA MELALUI SISTEM *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)* SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM Mendukung Kelancaran Arus Barang Di KPU Tanjung Priok

5.1 Formulasi kebijakan *Customs Advance Trade System (CATS)*

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan, peneliti mengelompokkan data penelitian berdasarkan faktor operasional penelitian yang telah dijabarkan dalam metode penelitian.

Teori-teori kebijakan publik dikutip dari Erwindra Rachman, 2003: James E. Anderson (1979;3) mendefinisikannya: “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern (serangkaian tindakan mempunyai tujuan tertentu yang diikuti oleh seorang pelaku atau kelompok kecil pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu)*”. *CATS* merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu dalam memecahkan masalah yang ada didalm publik untuk diikuti oleh warga Negara melalui penerapan suatu system.

Batasan atau definisi mengenai kebijakan publik telah banyak diberikan para ahli sesuai dengan pandangannya masing-masing. Harold Laswell mendefinisikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goals, values, and practice* (program tujuan, nilai, dan kebiasaan). Easton (1965, 212) mendefinisikannya sebagai *government action to address some problem* (tindakan pemerintah utnuk mengatasi beberapa masalah). *CATS* merupakan tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah yang ada salah satunya adalah kelancaran arus barang di KPU Tanjung Priok.

Dari hasil pengelompokkan tersebut diperoleh informasi mengenai proses formulasi kebijakan *Customs Advance Trade System (CATS)*:

5.1.1 Formulasi kebijakan Customs Advance Trade System (CATS)

a. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan tahapan untuk memahami masalah yang akan diangkat dalam kebijakan yang dirumuskan. Hal ini sesuai dengan esensi kebijakan publik yaitu untuk memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat. Dalam teori kebijakan publik, Charles O. Jones (1994) menyatakan bahwa masalah publik merupakan kebutuhan manusia yang perlu diatasi, dimana tidak semua permasalahan dimasyarakat dijamin untuk muncul sebagai sebuah permasalahan atau problem yang sifatnya umum (*public problem*).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, yang menjadi substansi mendasar dalam proses formulasi kebijakan CATS adalah ketidak lancaran arus barang di KPU Tanjung Priok. Permasalahan ketidaklancaran arus barang di KPU Tanjung Priok sebagai salah satu pelabuhan utama di Indonesia yang melayani ekspor dan impor sudah menjadi perhatian pemerintah. Pelabuhan tanjung priok merupakan satu satunya tempat dalam penanganan barang yang akan masuk atau keluar dari wilayah sekitar Jakarta, Jawa barat dan sekitarnya.

b. Formulasi kebijakan Customs Advance Trade System (CATS)

Setelah melakukan identifikasi masalah tahapan selanjutnya adalah melakukan Peramalan, rekomendasi dan pemantauan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative kebijakan. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan, mengestimasi sebagai akibat dari kebijakan yang diusulkan, dan mengenai kendala-kendala yang mungkin terjadi. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Kasubdit KITE & TPB Bid. Fasilitas Robert Marbun: *“Waktu itu kita simulasi dengan pertumbuhan ekonomi 4-9%, nah nanti 2012 kita perkirakan container itu antriannya akan sampai kantor pusat ini nanti kalau kita nggak mengambil langkah yang besar.*

Kemudian rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative

yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi sebagai akibat yang diusulkan, dan mengenai kendala-kendala yang mungkin terjadi.

Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

Pemantauan yang dilakukan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel berikut menunjukkan adanya peningkatan jumlah ekspor dan impor dalam 5 tahun terakhir yang dipengaruhi dan didukung oleh pelaksanaan sistem *Customs Advance Trade System* (CATS) melalui sistem *Indonesia Nasiona Single Window* (INSW).

Tabel 5.1 Jumlah ekspor Impor tahun 2007-2011

Tahun	Ekspor	Impor
2007	114.100.890.751	74.473.430.118
2008	137.020.424.402	129.197.306.224
2009	116.510.026.081	96.829.244.981
2010	157.779.103.470	135.663.284.048
Jan-Okt 2011	169.183.462.558	145.566.088.326

Sumber: <http://www.bps.go.id/>

c. Evaluasi

Evaluasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antar kinerja kerja yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan INSW dilakukan oleh Tim Kerja Pelaksanaan Uji Coba sistem NSW. Secara garis besar penerapan INSW pada tahap pertama dan kedua telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Oleh karena itu penerapan system INSW terus dilakukan di pelabuhan-pelabuhan utama lainnya. Sementara sistemnya masih terus dikembangkan untuk semakin mencapai tujuan dari penerapan CATS dalam sistm INSW.

5.1.2 Tipe formulasi kebijakan Customs Advance Trade System (CATS)

CATS merupakan ide kreatif dari Kasubdit KITE & TPS Bid. Fasilitas Robert Marbun yang didorong oleh pertanyaan Kuncoro mengenai bagaimana menangani ketidaklancaran arus barang di KPU Tanjung Priok. Hal ini seperti yang dikatakan Robert Marbun: “*Pak Kuncoro (Agus Kuncoro, Kepala seksi Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), meminta kepada tim kami untuk turut memberikan pemikiran dalam percepatan arus barang di Indonesia, tapi dengan menggunakan biaya yang sangat minim.*”

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, formulasi kebijakan CATS ini termasuk tipe formulasi kebijakan kreatif. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa CATS merupakan langkah inovatif dan terobosan baru dalam rangka menanggulangi masalah ketidak lancaran arus barang di KPU Tanjung Priok. Kreatifitas Kasubdit KITE & TPS bidang Fasilitas ini kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi system dalam bentuk pengadaan portal system CATS.

5.1.3 Model formulasi kebijakan *Customs Advance Trade System* (CATS)

Beberapa hal penting yang harus ditentukan sebelum memilih model formulasi kebijakan adalah kompleksitas isu atau permasalahan serta ketersediaan sumberdaya, khususnya kompetensi sumber daya manusia dan ketersediaan waktu. Untuk kebijakan dalam system CATS hal ini dapat dilihat dari proses identifikasi masalah, dimana kompleksitas masalah yang dihadapi adalah tingginya ketidaklancaran arus barang di KPU Tanjung Priok, pelaksanaan sistem manual yang saat masih berlangsung tidak mampu secara efektif menanggulangi masalah arus barang tersebut, serta terdapat juga kendala dari budaya masyarakat.

Berdasarkan teori perumusan kebijakan publik, system CATS dirumuskan berdasarkan model kelembagaan (*institutional*). Ada 3 hal inti dari model ini, yaitu bahwa pemerintah memang sah membuat kebijakan publik, fungsi tersebut bersifat universal, dan memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (koersi) dalam kehidupan bersama. Kebijakan pemerintah dalam CATS bertujuan untuk mengatur

atau menata sistem manual yang saat ini berlangsung yang tidak dapat menyerap jumlah barang yang akan diekspor maupun impor di KPU Tanjung Priok.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (koersi) dalam kehidupan bersama. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Robert Marbun: *“Nanti kita akan melihat lembaga mana yang memang lebih baik, efisien, efektif dan juga aman. Kami juga berharap jika ukm dapat menilai dengan cara yang objektif dan professional.”*

5.2 CATS sebagai salah satu upaya mendukung kelancaran arus barang di KPU Tanjung Priok

Suatu sistem logistik nasional harus merupakan suatu aliran distribusi yang melibatkan 4 PL (*party logistics*) yaitu *warehouse, distribution, transportation, and customs*. Rantai distribusi logistik yang baik harus dapat mewujudkan *fast and efficient distribution, achieve zero inventory, deliver the best security (24/7), fast container handling clearance, dan efficient warehousing service management*.

Gambar 5.1 Rantai Distribusi



Sumber Modul CATS

Definisi Supply Chain menurut Council of Logistics Management: *Supply Chain Management is the systematic, strategic coordination of the traditional business functions within a particular company and across businesses within the supply chain for the purpose of improving the long-term performance of the*

individual company and the supply chain as a whole. Hal ini berarti perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu dan dengan kualitas yang bagus.

Rantai distribusi dalam CATS merupakan sebuah jaringan yang saling terhubung dan bekerja sama yang didalamnya terdapat *warehouse service, distribution, 24/7 security, manufacture, container handling* semua ini disatukan dalam integrated logistic system. Hal ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh *Supply chain* menurut J. Aitkin merupakan “*a network of connected and interdependent organization mutually and co-operatively working together to control, manage and improve the flow of materials and information from suppliers to end users*”.

Pengertian manajemen rantai suplai menurut Martin Christopher adalah hubungan hulu dan hilir dengan pemasok dan pelanggan yang unggul dengan biaya yang lebih sedikit untuk rantai pasokan secara keseluruhan. Selaras dengan definisi diatas, rantai distribusi pada CATS juga menyangkut: pengelolaan arus barang atau jasa; pengelolaan mengenai pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang; dan sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang.

Sistem perdagangan global sangat rentan terhadap bahaya terorisme dan penyebaran isu-isu negatif lainnya yang tentunya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Institusi kepabeanan di seluruh dunia yang dikoordinasikan oleh WCO (*World Customs Organization*) dituntut untuk meningkatkan security dengan tetap menjamin kelancaran arus barang perdagangan internasional. Untuk itu WCO menyusun *WCO SAFE Framework* yang bertujuan:

- Untuk dapat dijadikan sebagai standar dalam menciptakan keamanan dan fasilitasi pada rantai distribusi barang serta implementasinya pada tingkat yang lebih luas guna meningkatkan *certainty and predictability*.
- Mengakomodasi penerapan integrated supply chain management untuk semua moda transportasi.

- Meningkatkan peranan, fungsi, dan kapabilitas institusi kepabeanan guna menghadapi tantangan dan kesempatan di abad ke-21.
- Memperkuat kerjasama antar administrasi kepabeanan untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi *high-risk consignments*.
- Memperkuat kerjasama antara institusi kepabeanan dengan dunia usaha.
- Menunjang kelancaran arus barang di rantai distribusi perdagangan internasional yang aman.

Empat elemen dasar SAFE *Framework*:

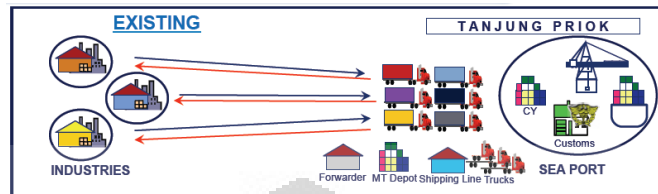
1. Harmonisasi atas infrastruktur advance *electronic cargo information* atas pengiriman barang.
2. Penerapan manajemen resiko yang konsisten dalam mengatasi ancaman/gangguan keamanan yang melalui arus barang.
3. Teknik outbound inspection yang dilakukan oleh administrasi kepabeanan berdasarkan risk *targeting methodology* dengan menggunakan *non-intrusive detection equipment*.
4. Memberikan keuntungan bagi dunia usaha yang memenuhi minimal *supply chain security standards and best practices*.

Dari berbagai masalah yang ada, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menawarkan solusi yang bersifat *quick win* dengan pendekatan biaya minimum (*minimizing cost*) dan optimasi waktu yang diperlukan dalam rangka implementasi, serta dalam penyesuaian terhadap peraturan terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penerapan *Customs Advance Trade System* (CATS), maka dapat ditetapkan prioritas untuk memberi solusi terhadap masalah logistik terutama yang berhubungan dengan proses *port clearance* dan *customs clearance*.

“Bagaimana dengan system infrastruktur kita untuk 5 tahun dari situ kita bisa optimal pemakaiannya. Intinya begini bagaimana caranya manage infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur itu bisa di manage, jadikan sebenarnya infrastruktur itu ada titik optimalnya jadi waktu dibangun dia sudah diperkirakan titik optimum nya. Nah jika infrastruktur itu tidak di

manage, nggak akan sampai titik optimumnya dia. Sehingga kita bikin waktu itu rekayasa bisnis proses, untuk mengoptimalkan fungsi dari infrastur itu. Jadi itulah CATS itu.”

Gambar 5.2 Proses Clearance



Sumber Modul CATS

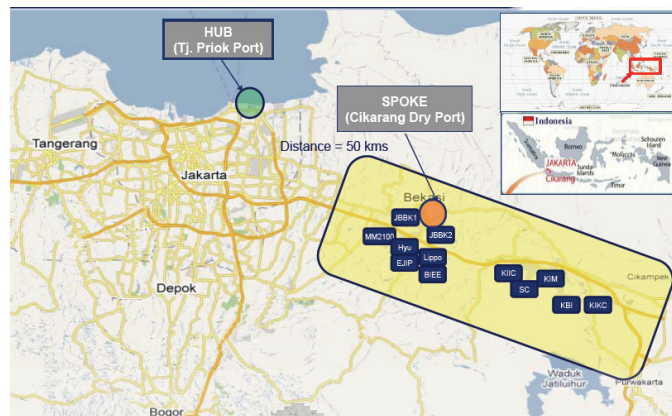
Gambar diatas merupakan skema yang masih berjalan saat ini di Tanjung Priok dimana proses *clearance* masih dipusatkan di Tanjung Priok. Sarana penunjang seperti *Forwarder*, *MT Depot*, *Shipping Line*, *Trucking* berada didekat pelabuhan dan berjauhan dari lokasi industri.

Gambar 5.3 Proses Clearance menurut CATS



Sumber Modul CATS

Gambar diatas merupakan skema yang ditawarkan oleh CATS, sarana penunjang seperti *Shipping line*, *Logistik*, *Forwarder*, *Trucking*, *MT Depot*, *Custom* berada dekat dengan lokasi industri sehingga mempermudah untuk penanganan barang. Semua sarana dan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan perdagangan baik ekspor maupun impor secara sistematis terhubung dengan KPU Tanjung Priok & pelabuhan melalui suatu portal yaitu CATS.

Gambar 5.4 Hub-Spoke System**Sumber Modul CATS**

Skema diatas menggambarkan *Hub-Spoke System*, dimana *Hub* yaitu lokasi tanjung priok tidak lagi menjadi satu-satunya tempat untuk menangani *custom clearance*. Selanjutnya proses *clearance* dapat dilakukan di 3 lokasi yang berbeda yaitu Cikarang, Tangerang dan Bogor. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Robert Marbun: “Ada *hub port* dan *inland port* atau *dry port*, jadi kita targetkan ada di tangerang, ada di bogor, ada di cikarang yang sekarang sudah ada di cikarang, yang di tangerang dan bogor belum ada, yang di cikarang sudah beroperasi tahun 2010.”

Secara garis besar CATS adalah:

1. Suatu sistem yang mengintegrasikan *logistics system*, *security system* dan *fleet management system*.
2. Utilisasi *supply-chain management*.
3. Penerapan *WCO SAFE Framework* dan *Authorized Economic Operator (AEO)*.
4. Penerapan *Container Security Initiative (CSI)/Customs-Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT)*.
5. Utilisasi *hub-spoke system* dan *inland port*.
6. Rekayasa bisnis proses terkait *customs and port clearances*.
7. Integrasi *Transways 4 PL (Party Logistics)*
8. Mengkombinasikan *less physical inspection* dan optimalisasi penggunaan *information technology*.

9. Sistem pelayanan dan pengawasan prima atas prosedur kepabeanan (ekspor, Tempat Penimbunan Berikat/*bonded zone*).
10. Integrasi *port community*.
11. Penerapan Intermoda Transportation System (*railways, trucking*).
12. Skema tatakerja: B2B, B2G, G2G.
13. Kerjasama antar negara melalui *Customs Mutual Recognition*.

CATS sebagai solusi dari permasalahan yang selama ini terjadi dalam kegiatan ekspor-impor. 5 pilar CATS adalah :

1. *Customs & Port Clearance System* (Hub – Spoke/Inland Port System) dengan menggunakan Kawasan Pelayanan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT),
2. *Transportation System* dengan menerapkan fleet management dalam pengangkutan barang,
3. *Security System* (security & tracking atas barang impor & ekspor),
4. *Information System* (peningkatan kualitas pelayanan & pengawasan kepabeanan dengan IT system),
5. serta sesuai dengan praktek kepabeanan internasional yakni *WCO SAFE Framework, AEO and Mutual Recognition among Customs.*”

CATS melakukan perubahan atas sistem pelayanan dan pengawasan yang telah ada dengan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur *information technology* (IT) dalam rekayasa bisnis proses yang ada. Ini artinya sistem pelayanan maupun pengawasan sekarang yang menitikberatkan pada proses manual seperti pemeriksaan fisik atas dokumen dan barang akan semakin berkurang dengan digunakannya piranti dan infrastruktur IT.

Beberapa aspek teknologi yang akan diterapkan dalam implementasi CATS adalah:

1. *Logistics Application Service Provider* (ASP)

Secara definisi, *Application Service Provider* (ASP) adalah suatu entitas pihak ketiga yang memberikan solusi dan sistem pelayanan yang berbasis *software* atas proses manajemen dan distribusi yang menghubungkan suatu pihak

dengan pihak lainnya melalui jaringan *wide area network* (WAN) dengan *central data center*.

Fungsi ASP pada model CATS adalah sebagai penyedia layanan berbasis komputer atas sistem jaringan komunikasi data antar pengguna (*user*) yang terlibat dalam *logistics process* dan *port & customs clearance*. Untuk itu perlu untuk dibangun suatu *gateway-portal* yang disediakan oleh *operator spoke area* atau *inland port* yang terintegrasi dengan *inhouse system* pihak lain yang terkait dengan CATS.

Hal ini selaras dengan pengertian administrasi menurut William H. Newman mengemukakan: “*administration has been defined as the guidance, leadership and control of the effort of a group of individuals towards some common goal*”. Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan daripada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama.

Melalui ASP maka kompleksitas penggunaan *software* terkait *logistics system* dan efisiensi *cost* pengadaan aplikasi tertentu dapat dikurangi. Hal ini dapat dimungkinkan karena pihak ASP harus dapat memberikan garansi atas hal-hal sbb:

- pemeliharaan atas sistem dan jaringan,
- layanan *up-to-date* atas sistem aplikasi,
- 24 x 7 dukungan teknis,
- *physical and electronic security*, dan
- *in-built support* atas kelangsungan bisnis dan fleksibilitas kinerja.

Posisi *software* aplikasi berada pada sistem di vendor (ASP) dan dapat di akses oleh *users* melalui internet (*web browser*) dengan menggunakan HTML atau pada hal tertentu software dapat juga disediakan oleh vendor. Sistem aplikasi yang akan dipergunakan pada CATS juga memungkinkan untuk dapat melakukan *interface* dengan *custom client software* melalui protokol XML API (*application programming interface*) yang juga dapat diintegrasikan dengan *in-house systems* lain (contoh: *in-house DJBC, NSW*).

Sistem yang dibangun akan menggantikan proses manual seperti yang dikatakan dalam wawancara: *“Lalu information system, klo orang mau sewa container harus kesana pake motorlah untuk pesan, orang kalo mau sewa transport itu gak perlu kesana-sini, trus untuk orang bayar uangnya juga gak perlu ke bank itu langsung aja jadi itu semua done by IT.*

Fitur umum lain terkait ASP adalah:

- ASP mempunyai hak secara penuh untuk memiliki dan mengoperasikan aplikasi berbagai *software* dalam sistem yang digunakan;
- ASP adalah pihak yang bertanggungjawab untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan atas *server* yang menunjang operasional *software*;
- ASP menyediakan informasi kepada *users* melalui internet atau *‘thin client’*;
- ASP dapat membebaskan tagihan penggunaan aplikasinya dengan metode *“per-use” basis* atau *monthly/annual fee*.

2. Penggunaan *Electronic Seal* (eSeal)

Penggunaan *electronic seal* (eSeal) yang digunakan dalam CATS ditujukan sebagai *Container Security Device* (CSD) selain juga dapat difungsikan sebagai pengganti segel DJBC yang terbuat dari kertas (sticker) yang dirasakan kurang memenuhi syarat dalam penggunaannya di lapangan. Melalui penggunaan Customs eSeal yang menggunakan teknologi RFID (*Radio Frequency Identification*) diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan DJBC serta dapat menunjang kelancaran pelayanan arus barang terutama terkait *port and customs clearance*.

Dalam wawancara dengan Robert Marbun disebutkan :*“Container security, karena 9/11 gerakan teroris, jadi semua pergerakan arus barang harus secure. Jadi jika barang kita diekspor nanti akan diperiksa dan kita belum punya solusi, oleh karena itu kita tawarkan system CATS. e-Seal, segelnya gak gampang rusak, mencabutnya musti pake 1 ton, ditarik dengan 1 ton baru bisa lepas, dia bisa tracking itu, tempatnya dimana, pergerakan barangnya juga bisa, kontainernya*

dimana juga bisa ditracking. Kalo pintunya dibuka segelnya, kalo container security itu rusak, juga bisa tahu.”

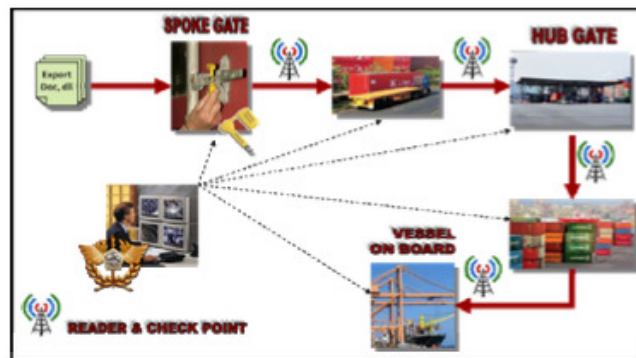
Berkaitan dengan penerapan IT atas factor *security*, harus *comply* dengan standar yang berlaku secara internasional. Salah satu standar yang dapat dipakai disini adalah GS1 (Global Standards-1) yang merupakan standar yang berlaku dan dipakai secara umum di seluruh dunia terkait proses identifikasi dalam sistem logistik.

Secara umum, teknologi eSeal yang akan dipakai dalam CATS harus mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- Menggunakan teknologi *permanent active* RFID eSeal (*transmit & receive data*);
- Dapat digunakan berulangkali (*reusable*);
- Dapat memuat data yang diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam *logistics*;
- Sesuai dengan standar internasional terkait aspek *security*, *service*, dan *logistic requirements* (contoh: ISO, GS-1);
- Mampu untuk mengantisipasi kerusakan baik *physical* maupun *data content*;
- Adanya sensor yang dapat mengindikasikan kondisi lingkungan kontainer.

Melalui penggunaan eSeal dan teknologi RFID, proses rekonsiliasi data yang sebelumnya berlangsung secara manual dan memerlukan waktu yang cukup lama akan dapat menjadi lebih efisien baik dari sisi waktu maupun biaya operasionalnya serta dapat lebih di-*manage* dari sisi resiko dan validitas datanya.

Gambar: 5.5 Security and Trackability on Movement of Goods



Sumber Modul CATS

3. Fleet Management System.

Dalam rangka menunjang kinerja logistik supaya dapat lebih optimal, diperlukan adanya sistem yang menyediakan informasi terkait pergerakan arus barang (cargo) dan moda transportasi.

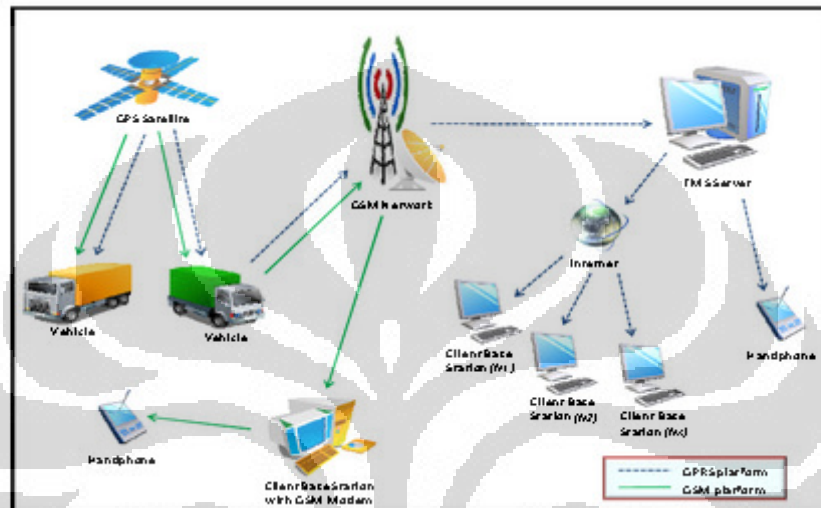
Pengertian *Intermodal freight transport* menurut Wikipedia adalah: “*Intermodal freight transport involves the transportation of freight in an intermodal container or vehicle, using multiple modes of transportation (rail, ship, and truck), without any handling of the freight itself when changing modes. The method reduces cargo handling, and so improves security, reduces damages and losses, and allows freight to be transported faster. Reduced costs over road trucking is the key benefit for intracontinental use. This may be offset by reduced timings for road transport over shorter distances.*”

Pengertian Intermoda angkutan barang menurut Wikipedia adalah: Intermoda transportasi angkutan melibatkan transportasi angkutan dalam wadah intermoda atau kendaraan, menggunakan beberapa mode transportasi (kereta, kapal, dan truk), tanpa penanganan barang ketika mengubah mode. Metode ini mengurangi penanganan kargo, dan meningkatkan keamanan, mengurangi kerusakan dan kerugian, dan memungkinkan pengangkutan untuk diangkut lebih cepat. Mengurangi biaya perjalanan truk adalah manfaat kunci untuk digunakan di intracontinental. Hal ini dapat diimbangi dengan mengurangi waktu transportasi perjalanan jarak pendek.

Informasi mengenai *fleet management system* pada model CATS ini mencakup kegiatan pada *inland & intermoda transportation*, namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikembangkan pada level yang lebih advance

yaitu hingga barang dimuat di sarana pengangkut tujuan ekspor dan seterusnya. Hal tersebut dapat dimungkinkan dengan digunakannya teknologi GPS (*Global Positioning System*) dan GIS (*Geographic Information System*) sebagai sarana pendukung pada sistem ini.

Gambar: 5.6 Teknologi GPS dengan menggunakan platform GSM/GPRS pada (Fleet Management System)



Sumber Modul CATS

Secara umum informasi yang dapat disediakan pada *fleet management system* meliputi:

- Real time tracking service of vehicles and freight;
- Vehicle operation management;
- Freight transport arrangement;
- Cyberspace logistics information; dan
- Weather, traffic conditions, map information.

Hal serupa juga disebutkan oleh Kasubdit KITE & TPB Bid Fasilitas, Robert Marbun: “Transport system, fleet management, jadi ini kita bilang multimodal transportation jadi tidak hanya truk juga ada kereta api, kapal, pesawat jadi kita masukkan kedalam satu system jadi ini terhubung satu dengan yang lain.”

Selain itu fleet management juga mengatur informasi perjalanan, seperti yang dijelaskan: “Kita bangun system itu yang paling ideal itu ada di satu portal,

dia punya akses untuk itu semua di operatornya itu jadi traffiknya itu bisa diatur. Misalnya pake siaran radio, jadi dikasih tau “priok macet, jangan berangkat dulu” jadi truck nya diatur waktunya.”

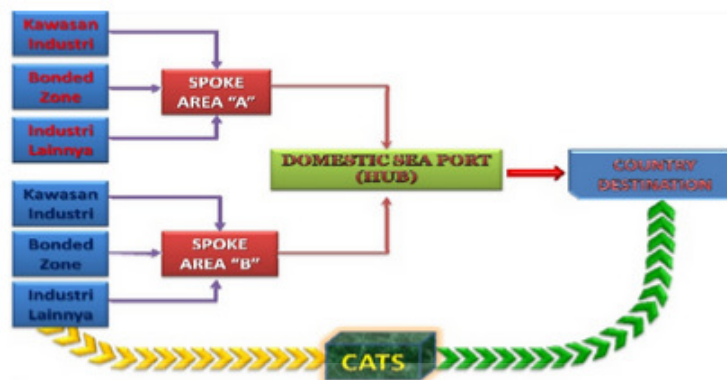
Fleet management juga menyediakan informasi mengenai letak/posisi kendaraan: “kemudian security system, untuk perdagangan ada yang namanya tracking mobility, ekspor impor itu harus bisa di traceable, tracking menggunakan gps”. Melalui penerapan fungsi fleet management system tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas dari infrastruktur logistik yang telah ada sehingga dapat menghasilkan kapasitas riil yang lebih optimal.

4. Implementasi *Customs Mutual Recognition*

Melalui implementasi WCO SAFE *Framework* dan konsep AEO tentunya akan dapat meningkatkan *Customs-to-Business relationship*, sehingga pertukaran data antara pelaku usaha dengan DJBC dan juga antar institusi kepabeanan di dunia (*Customs-to-Customs relationship*) dapat diakomodasi secara lebih riil yang tentunya sangat berguna bagi fungsi manajemen resiko maupun pengambilan keputusan di bidang kepabeanan.

Jaringan data dan informasi logistik (*seamless data pipeline*) pada model CATS dapat digunakan untuk proses akreditasi dengan pihak yang berkepentingan di negara tujuan terutama dalam rangka proses *mutual recognition*. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat lebih meningkatkan kerjasama antar negara terutama di bidang kepabeanan khususnya dalam rangka penerapan *Container Security Initiative (SCI)* maupun *Customs-Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT)*.

Gambar: 5.7 Customs Mutual Recognition



Sumber Modul CATS

CATS diharapkan dapat digunakan sebagai modal dasar kerjasama *Customs-to-Customs* sehingga proses *mutual recognition* dapat diwujudkan dalam rangka mendorong kemudahan ekspor dari dalam negeri ke luar negeri untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada sebelumnya (contoh: *green line* atau *priority line*). Hal ini tentunya juga seiring dengan konsep *Integrated Border Management* antar negara.

Implementasi *Customs Mutual Recognition* saat ini belum dilakukan karena system CATS yang belum selesai implementasinya, sesuai dalam wawancara: “Ini yang terakhir, ini yang belum kita lakukan.... Ini kerjanya bea cukai ini. Yang kelima ini belum, ini semuanya belum ideal sih tapi kita sudah mulai.

5.3 Proses implementasi sistem CATS melalui sistem INSW

CATS merupakan perubahan atas sistem pelayanan dan pengawasan yang telah ada dengan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur *information technology* (IT) dalam rekayasa bisnis proses yang ada. Dalam tahap persiapan pelaksanaannya pada akhir Oktober 2010 dalam rangka mendukung Kesepakatan Pemimpin Negara Anggota ASEAN dalam Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint, maka system CATS dilebur kedalam system INSW. Konsep dasar yang dimiliki oleh CATS disatukan untuk menyempurnakan system yang telah ada didalam INSW. Selain itu tujuan yang mendasari CATS juga selaras dengan konsep jangka panjang penerapan Sistem NSW di Indonesia, yaitu

pelaksanaan integrasi Sistem NSW dari ke-10 negara Anggota ASEAN (ASEAN Member States atau AMS) sudah ditargetkan sejak awal perumusan konsep ASEAN Single Window (ASW) dan pengembangan NSW di masing-masing AMS. Konsep dasar yang disepakati bahwa ASW merupakan media integrasi data dan informasi serta menyediakan fasilitas koordinasi antar negara anggota ASEAN (AMS) melalui pertukaran data secara elektronik.

Penerapan system NSW di Indonesia memiliki tujuan utama yaitu Penerapan Sistem Nasiona Single Window di Indonesia, pada dasarnya mempunyai tujuan utama yang menyangkut dua aspek, yaitu : untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan efektifitas pengawasan, serta kinerja seluruh kegiatan yang terkait dengan lalulintas barang ekspor-impor dan untuk me-minimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan penanganan atas lalulintas barang ekspor-impor, terutama yang terkait dengan proses *customs clearance and release of cargoes*.

Kemudian sasaran yang dituju dalam pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia adalah peningkatan kecepatan proses layanan yang terkait dengan ekspor-impor di semua Instansi Pemerintah (GA); minimiliasi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha dalam melakukan pengurusan dan penyelesaian kewajiban ekspor-impor; peningkatan validitas dan akurasi data/ informasi yang terkait dengan ekspor-impor; penyediaan instrumen pengawasan yang efektif untuk mengawasi seluruh kegiatan layanan ekspor-impor; penerapan prinsip-prinsip Good-Governance pada semua layanan publik yang terkait dengan ekspor-impor, di seluruh Instansi Pemerintah.

Kemudian manfaat yang akan diperoleh dengan adanya pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia khususnya bagi Masyarakat Usaha (Private Sector) adalah memberikan kepastian terhadap biaya dan waktu yang diperlukan dalam pelayanan yang terkait dengan ekspor-impor; tersedianya layanan publik yang mudah, murah dan pasti; meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional; memperluas akses pasar dan sumber-sumber faktor produksi; meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya; mendorong tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan; mendukung penerapan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance dalam penyelesaian ekspor-impor. Sedangkan manfaat bagi Instansi Pemerintah (secara umum) adalah tersedianya sistem pelayanan publik yang berbasis otomasi secara elektronik; terwujudnya simplifikasi dan harmonisasi proses bisnis antar Instansi Pemerintah; terintegrasinya data dan informasi layanan publik antar Instansi Pemerintah; terciptanya manajemen risiko yang lebih baik dalam sistem layanan publik; menghilangkan redundansi dan duplikasi data yang terkait ekspor-impor; meningkatkan validitas dan akurasi data yang terkait ekspor-impor; memudahkan pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat pemerintah dalam kaitan dengan kegiatan ekspor-impor; meningkatkan perlindungan atas kepentingan nasional dari ancaman yang mungkin timbul karena lalulintas barang ekspor-impor; mengoptimalkan penerimaan Negara; mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Public Governance dalam seluruh kegiatan pelayanan publik yang terkait ekspor-impor.

Sedangkan manfaat bagi upaya perbaikan sistem layanan di Instansi Pemerintah adalah mendorong semua GA, terutama yang terkait dengan ekspor-impor untuk membangun inhouse-system melalui otomasi sistem pelayanan publik secara elektronik dalam seluruh layanan yang terkait ekspor-impor; melakukan standardisasi elemen data yang digunakan dalam sistem pelayanan supaya sesuai dengan standar internasional, sehingga memungkinkan untuk pertukaran data melakukan simplifikasi proses bisnis layanan publik sehingga pelayanan menjadi lebih sederhana, cepat dan efektif; melakukan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis antar instansi pemerintah.

Manfaat bagi upaya perbaikan sistem layanan di Instansi Pemerintah juga mendorong semua instansi pemerintah memberikan “kepastian” dalam seluruh layanan publik yang terkait ekspor-impor, melalui: penetapan janji layanan publik kepada para pelaku usaha, dengan membuat produk hukum yang mengatur tentang Service Level Agreement (SLA); penetapan standar baku prosedur dan mekanisme pelayanan publik, dengan membuat produk hukum yang mengatur tentang Standar Operating Prosedur (SOP), yang menjadi dasar dan pedoman dalam pemberian pelayanan publik.

5.4 Perkembangan Penerapan Sistem INSW

Pembangunan NSW Indonesia tetap dilaksanakan dengan prinsip yang juga mengakomodir prinsip yang ada dalam perjanjian ASEAN Single Window yaitu untuk meningkatkan efisiensi pelayanan penyelesaian dokumen, *customs clearance* dan *cargo release* tetapi sekaligus berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ekspor impor, merupakan sistem pelayanan yang memiliki 2 sub yaitu *trade net* dan *port net* untuk kelancaran *flows or document* dan *flows of good*; melayani kegiatan ekspor dengan semua negara tidak hanya negara-negara ASEAN; dan dilakukan secara bertahap untuk aktivitas impor, ekspor, komoditi, pelabuhan, instansi yang terlibat dan kelembagaanya.

Sebelumnya sistem NSW untuk pelayanan impor sudah dilakukan tahun 2007 hingga saat ini sudah diterapkan secara mandatori di 5 (lima) pelabuhan utama, yaitu tanjung priok, tanjung emas, tanjung perak, belawan dan bandara soekarno hatta. Dalam KEP-50/BC/2010 pemerintah menetapkan berdasarkan pada penjadwalan dan tahapan penerapan Sistem National Single Window (NSW) serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, Sistem NSW Ekspor dilakukan penerapan secara penuh (*mandatory*) di 5 (lima) Pelabuhan Utama yaitu di pelabuhan tanjung perak, di pelabuhan tanjung emas, pelabuhan belawan, tanjung priok dan di bandara soekarno hatta.

KEP-50/BC/2010 juga menetapkan pemberlakuan penerapan secara penuh (*mandatory*) Sistem National Single Window (NSW) Ekspor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta.

5.5 Perubahan yang terjadi setelah penerapan Sistem Informasi Manajemen melalui sstem INSW

Kendala dan hambatan sebelum penerapan sistem INSW, pemberitahuan masih dilakukan secara manual: untuk menerima, memeriksa dan meneliti satu persatu dokumen pemberitahuan hasil export/impor hal ini dilakukan tanpa bantuan komputer. Hal ini juga mengakibatkan keterlambatan waktu yang diperlukan untuk meneliti satu persatu dokumen. Saat ini system manual tersebut

sudah ditinggalkan, dan proses serta analisa saat ini diberikan melalui komputer berdasarkan manajemen resiko yang didasarkan pada pembuatan profil komoditi dan importir. Hal ini selaras dengan konsep dari system informasi manajemen.

Sistem informasi manajemen (*manajemen information system* atau sering dikenal dengan singkatannya MIS) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. SIM (sistem informasi manajemen) dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Semua sistem-sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah (*lower level management*), manajemen tingkat menengah (*middle level management*) dan manajemen tingkat atas (*top level management*). Sistem Informasi Manajemen menurut Gordon B. Davis adalah sebuah system manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Davis, 1995, hal.3)

Sistem Informasi Manajemen diterapkan kedalam Sistem National Single Window memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan efektifitas pengawasan, serta kinerja seluruh kegiatan yang terkait dengan lalulintas barang ekspor-impor dan untuk me-minimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan penanganan atas lalulintas barang ekspor-impor, terutama yang terkait dengan proses customs clearance and release of cargoes. Dalam hal mewujudkan tujuan tersebut pemerintah bekerjasama dengan PT EDI Indonesia. Sistem yang dimiliki PT EDI Indonesia adalah dalam bentuk Pertukaran Data Elektronik (Electronic Data Interchange / EDI), system ini adalah transmisi data terstruktur antar organisasi secara elektronis. Proses ini dapat digunakan untuk mengirimkan dokumen elektronis ataupun data perusahaan dari satu komputer ke komputer lainnya atau antara satu trading partner ke trading partner lainnya tanpa campur tangan manusia. Didalamnya sistem EDI memiliki:

- a. Modul PIB, modul PIB adalah modul yang diperlukan oleh Importir atau PPJK dalam rangka menyiapkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk dikirimkan ke Bea & Cukai dan menerima semua respon dari Bea & Cukai.

Melalui modul ini Importir/PPJK dapat juga mencetak dokumen PIB sebagai bahan untuk pembayaran SSPCP ke Bank.

b. Modul PEB, modul PEB adalah modul yang diperlukan oleh Eksportir atau PPJK dalam rangka menyiapkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk dikirimkan ke Bea & Cukai dan menerima semua respon dari Bea & Cukai. Melalui modul ini Eksportir/PPJK atau Konsolidator juga dapat membuat dokumen Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE).

c. Modul TPB, modul TPB adalah modul yang diperlukan oleh pengusaha dalam Kawasan Berikat dalam rangka menyiapkan dokumen BC23 Impor ke Bea & Cukai dan menerima semua respon dari Bea & Cukai.

d. Modul Pengangkut, modul Pengangkut adalah modul yang diperlukan oleh Shipping/Air Lines dalam rangka menyiapkan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (JKSP) dan Manifes Inward/Outward untuk dikirimkan ke Bea & Cukai dan menerima semua respon dari Bea & Cukai.

e. Modul Pengangkut KPPT, modul Pengangkut KPPT adalah modul pengangkut yang diperlukan oleh Shipping Lines yang berhubungan khusus dengan KPPT Bekasi.

f. Modul Bank, modul Bank adalah modul yang diperlukan oleh Bank penerima pembayaran pajak dalam rangka impor/ekspor untuk membuat dokumen SSPCP dan dikirimkan ke Bea & Cukai serta menerima semua respon dari Bea & Cukai.

g. Modul Entry Manifes, modul Entry Manifes adalah modul yang digunakan oleh Freight Forwarder dalam rangka menyiapkan Dokumen Manifes baik Inward maupun Outward untuk kemudian diserahkan kepada Shipping Line untuk dilaporkan ke Bea dan Cukai.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang diperoleh peneliti maka dapat disimpulkan:

1. *Customs Advance Trade System (CATS)* merupakan pemikiran awal dari pada adanya penyelenggaraan dan penyelesaian pemberitahuan kepabeanan melalui 1 (satu) atap. *Customs Advance Trade System (CATS)* salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh DJBC dalam rangka mempercepat arus barang di KPU Tanjung Priok. CATS melakukan perubahan atas sistem pelayanan dan pengawasan yang telah ada dengan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur teknologi informasi dalam rekayasa bisnis proses yang ada. Melalui sistem ini sistem pelayanan maupun pengawasan dapat dilakukan dengan menggunakan piranti dan infrastruktur IT.
2. *Customs Advance Trade System (CATS)* diimplementasikan melalui peleburan dengan system yang sudah ada yaitu *Indonesia National Single Window (INSW)*. Pelaksanaan INSW untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan efektifitas pengawasan, serta kinerja seluruh kegiatan yang terkait dengan lalulintas barang ekspor-impor dan untuk me-minimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan penanganan atas lalulintas barang ekspor-impor, terutama yang terkait dengan proses *customs clearance and release of cargoes*.

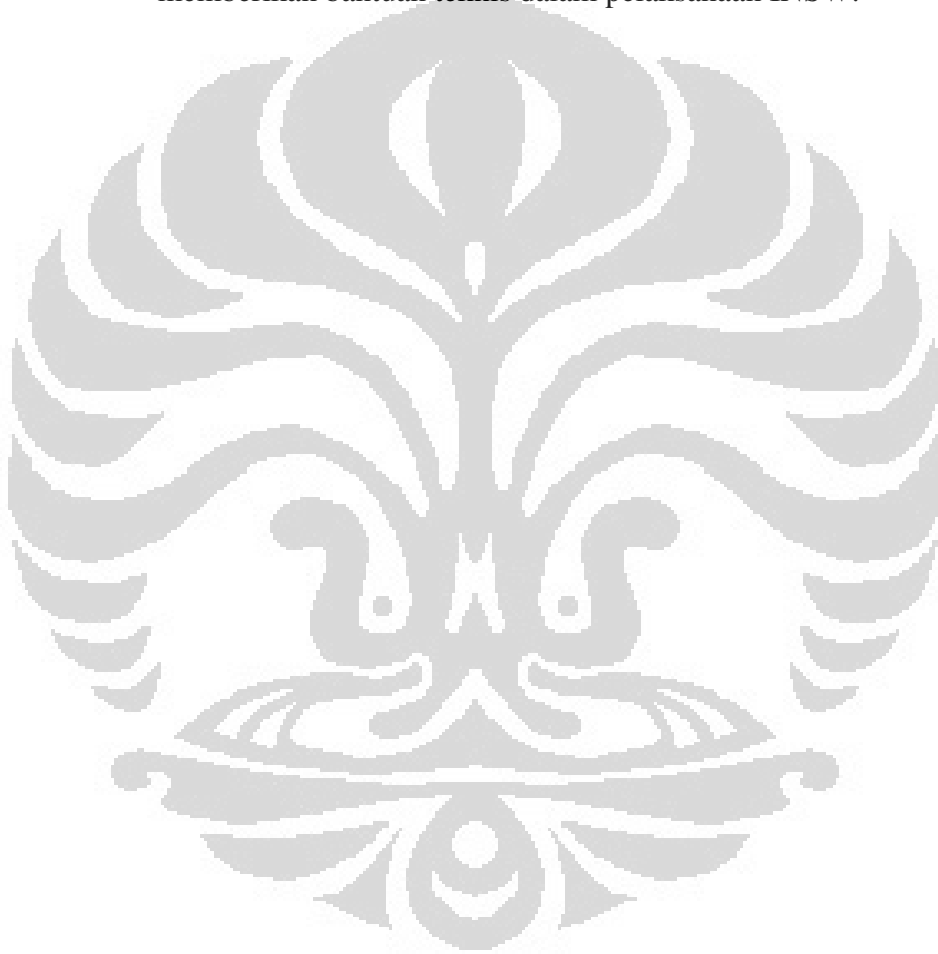
6.2 Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbaiki kinerja yang melayani sistem INSW yang didasarkan atas formulasi yang yang berasal dari pemikiran adanya *Customs Advance Trade System (CATS)*. Mengembangkan kemudahan dan

fitur yang sangat dibutuhkan Pelaku Usaha dan mendorong paperless sistem di seluruh layanan publik. Mengembangkan fitur dan fasilitas yang akan memudahkan User (Pelaku Usaha) dalam melakukan akses layanan melalui Portal INSW.

2. Penyiapan dan peningkatan mutu dari pada sumber daya manusia yang melayani sistem INSW. Mengembangkan kualitas pelayanan yang prima seperti menyediakan petugas yang mudah dihubungi yang bertujuan memberikan informasi yang dibutuhkan dan memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan INSW.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bungin, Burhan. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Cnossen, Sijbren. (2005). *Theory and Practice Of Excise Taxation (Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving)*. New York : Oxford University Press Inc.

Creswell, John W. (2002). *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. California: KIK Press.

Hanafi, Nono dan Alamsjah, M. Iqbal. (2003). *Petunjuk Perpajakan Praktis*. Jakarta : PT. Kharisma Bintang Kreativitas Prima.

Ilyas, Wirawan B. dan Burton, Richard. (2008). *Hukum Pajak Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.

Kountur, Ronny. (2004). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.

Mikesell, John.L, (1998). *Fiscal Administration, Analysis and Application For The Public Sector*. Illinois:The Dorsey Press.

Moleong, J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Neuman, W. Laurence. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (5th.ed)*. Boston: Allyn and Bacon.

Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Pardiat. (2007). *Pemeriksaan Pajak Edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

- Prakosa, Kesit Bambang. (2006). *Hukum Pajak*. Yogyakarta : EKONIS.
- Pudyatmoko, Y. Sri, (2005). *Pengadilan dan Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Purwito, Ali. (2009). *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FHUI Bekerja sama dengan Badan Penerbit FHUI.
- Rahayu, Sri Ani. (2010) *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santi, Kusuma dan Sopa, Ikhwan. (2006). *Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan Untuk Kawasan Industri dan Kawasan Berikat*. Jakarta : PT. Gemilang Gagasindo Handa.
- Sanusi, Bachrawi. (2004). *Potensi Ekonomi Migas Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Shome, Parthasarathi. (1995). *Tax policy handbook*. Washington: International Monetary Fun.
- Soemitro, Rochmat. (1992). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung : PT. Eresco.
- _____. (1976). *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco.
- Soemitro, Rochmat dan Sugiharti, Dewi Kania. (2004) *Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi*. Bandung : PT. Refika Aditama.

- Subiyantoro, Heru, Singgih Riphath. (2004). *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas.
- Subki, Muhammad Sukri dan Djumadi. (2007). *Menyelesaikan sengketa pajak melalui pengadilan pajak*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Tambunan, Tulus. (2001). *Perdagangan internasional dan neraca pembayaran: Teori dan empiris*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Thuronyi, Victor. (1996). *Tax Law Designs and Drafting (volume 1)*. New York: International Monetary Fund.
- Wagner, Richard E. (1983). *Public finance revenues and expenditures in a democratic society*. Boston: Little Brown and Company.
- Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. (2003). *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Contemporary regulatory policy, Marc Allen Eisner, Jeff Worsham, Evan J. Ringquist. (2000). Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc.
- Dye, Thomas. R. (1978). *Understanding Public Policy*. New York: Prentice Hall Inc.
- Public Policy Analysis: An Introduction, Third Edition, William N. Dunn, New York: Prentice Hall Inc. 2003
- Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Client Coordinator.2011. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai

Karya Ilmiah :

- Nuurul Ayuni. (2009). Analisis kepemimpinan kepala daerah Kota Kendari dalam formulasi kebijakan Program Persaudaraan Madani.

Erika Novita. (2010). Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas bea masuk early harvest program (EHP) atas subsektor hortikultura dalam rangka perdagangan bebas asean-china periode 2004-2009

Undang-undang dan Peraturan :

_____ ,Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP BC/50/2010 tentang Penerapan secara penuh mandatory system Indonesia Nationa Single Window (INSW) Ekspor

_____ , Inpres nomor 1 tahun 2010, tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010

Sumber Lainnya :

Modul Pusdiklat Bea dan Cukai

www.depkeu.go.id

www.wikipedia.com

<http://www.bps.go.id/>